

Perencanaan penggunaan lahan untuk
pembangunan rendah emisi

Luwes

Land-use planning for low-emission
development strategies

NEWS BULLETIN

VOLUME III NO.1/MEI 2016



LOKAKARYA NASIONAL: MEMBUMIKAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

National Workshop: Socialising Land-based Low-emission Development in Indonesia

FESTIVAL IKLIM 2016: MENGATASI PERUBAHAN IKLIM BUKAN SEKEDAR DOKUMEN POLITIK

Climate Festival 2016:
Addressing Climate Change is
More Than Political Documents

PAVILIUN INDONESIA COP 21 PARIS: SEKELUMIT PEMBELAJARAN UPAYA INISIATIF AKSI MITIGASI LOKAL BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

Indonesian Pavilion at COP 21 Paris: Lessons
Learned from Locally Mitigation Action Initiatives
from Land-based sector in Indonesia



Dari Redaksi

Editor's notes

Dalam edisi Mei 2016 LUWES News Bulletin membahas beragam informasi, cerita lokal, perkembangan terbaru sekaligus pembelajaran tentang kegiatan yang dilakukan oleh ICRAF dan mitra pelaksana program ParCiMon dan LAMA-I dalam mendukung pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan di Indonesia.

Program LAMA-I dan ParCiMon saat ini sedang memasuki tahap proses pengarusutamaan pembangunan rendah emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Aksi Mitigasi yang telah berhasil diidentifikasi oleh Pokja dampingan kedua program ini sedang diusung kepada para pemangku kepentingan untuk dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan proses sinkronisasi di tingkat Provinsi dan Nasional. Proses tersebut terekam dalam 2 (dua) artikel yang diulas dalam LUWES News Bulletin kali ini yaitu artikel "Dari Kebijakan menuju aksi nyata: Mengawal Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi Berbasis Lahan di Sumatera Selatan" dan artikel "Dukungan Kebijakan: Ujung tombak pengarusutamaan pembangunan rendah emisi berbasis lahan di Indonesia"



In the May 2016 edition, the LUWES News Bulletin highlighted a variety of information, local stories, the latest developments and lessons learned about the activities undertaken by ICRAF and implementing partner of the ParCiMon and LAMA-I programs in support of sustainable low-emission development in Indonesia.

LAMA-I and ParCiMon are now entering the stage of development of low-emission process of mainstreaming into local development planning. Mitigation Action Plan which has been successfully identified by the Working Group, assisted both these programs being promoted to policy makers at local level, therefore to be integrated into local development planning and finally being synchronize with the development planning at provincial and national level. The process is documented in the (two) articles that titles: "From Policy into action: Overseeing Land-based Low-emission Development planning in South Sumatra" and "Policies Support:

Cerita menarik dari perkembangan perubahan iklim dunia internasional di tuangkan dalam artikel bertajuk "Paviliun Indonesia COP 21 Paris: Sekelumit pembelajaran Upaya Inisiatif Aksi mitigasi lokal berbasis lahan di Indonesia". Artikel ini mengulas upaya program ParCiMon dan LAMA-I untuk berbagi kisah-kisah sukses sekaligus pembelajaran yang telah dilakukan dalam upaya penyusunan strategi pembangunan rendah emisi.

Tidak hanya di ranah internasional, upaya penyebarluasan informasi mengenai pencapaian dan pembelajaran yang didapatkan melalui program ParCiMon dan LAMA-I pun turut dilakukan di tingkat nasional. Upaya tersebut dituangkan dalam artikel berjudul "Festival Iklim 2016: Mengatasi Perubahan Iklim Bukan Sekedar Dokumen Politik", yang mengulas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan COP 21 Paris.

Setelah mengulas para *champion* penggerak roda inisiatif pembangunan rendah emisi di tanah Papua pada dua edisi sebelumnya, kali ini LUWES News Buletin berhasil mengangkat cerita dan cita-cita penggiat pembangunan rendah emisi dari Bumi Sriwijaya. Profil Ibu Regina Aryanti, ST turut mewarnai perkembangan pembangunan hijau di Sumatera Selatan.

Semoga berbagai artikel menarik yang ditampilkan di LUWES News Buletin edisi Mei 2016 ini dapat menjadi sumber informasi dan memberikan inspirasi bagi para pembaca terkait upaya-upaya pembangunan rendah emisi di Indonesia.

Akhir kata, kami dari redaksi mengucapkan selamat membaca.

Salam lestari

Leading-edge of mainstreaming land-based low-emission development in Indonesia"

An interesting story from the International event regarding climate change, featured in the article "The Indonesian pavilion COP 21 Paris: Lessons Learned from Locally Mitigation Action Initiatives from Land-based sector in Indonesia". This article reviews the effort from ParCiMona and LAMA-I programs in order the program's success stories and lessons learned that has been gained through the implementation of both program in regards to the development of low-emission development strategies.

Not only in story from the international event, the dissemination information regarding the achievements and lessons learned from the program ParCiMon and LAMA-I also has been done at the national level. The article entitled "Climate Festival 2016: Addressing climate change is more than Political Documents", this articles highlighted the event undertaken by the Ministry of Environment and Forestry in order to follow up the COP 21 Paris agreements.

The last two editions of LUWES News Bulletin has featured champions of the low-emission development initiatives in Papua, in this recent edition we are honored to feature the champion of low-emission development initiative from South Sumatera, Mrs. Regina Aryanti, ST one of the leading actor that influenced the development of green development in South Sumatra.

Hopefully, the variety of interesting articles that appear in In the May 2016 edition, the LUWES News Bulletin can give you a useful information and inspiration for readers in regards to the initiatives on low-emission development in Indonesia.

Finally, we would like to say, happy reading!

EDITORIAL TEAM LUWES NEWS BULLETIN

Volume III No.1
Mei 2016

Editors in chief	: Suyanto and Sonya Dewi
Managing editors	: Robert Finlayson, Burhanuddin Zein, Andree Ekadinata, Feri Johana, and Yessi Dewi Agustina
Contributors	: ParCiMon and LAMA-I team
Layout and design	: Sadewa
Editorial secretariat	: Tikah Atikah, Cintin Sakina
Cover photo	: Yessi Dewi Agustina

Daftar Isi

Table of Contents



15



19



26

02 DARI REDAKSI

Editor's notes

05 DUKUNGAN KEBIJAKAN: UJUNG TOMBAK PENGARUSUTAMAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

Support Policies: Leading-edge in mainstreaming land-based low emissions development in Indonesia.

10 LOKAKARYA NASIONAL: MEMBUMIKAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

National Workshop: Socialising Land-based Low-emission Development in Indonesia

15 FESTIVAL IKLIM 2016: MENGATASI PERUBAHAN IKLIM BUKAN SEKEDAR DOKUMEN POLITIK

Climate Festival 2016: Addressing Climate Change is More Than Political Documents

19 MENCETAK KADER PEMBANGUNAN HIJAU BERBASIS LAHAN DI SUMATERA SELATAN

Regeneration of Experts in land-based Green Development in South Sumatra.

22 INSTANT DUKUNG KABUPATEN BANYUASIN LETAKKAN FONDASI BAGI PEMBANGUNAN HIJAU YANG BERKELANJUTAN

INSTANT Supports Banyuasin District in Establishing the Foundation for Sustainable Green Development

26 DARI KEBIJAKAN MENUJU AKSI NYATA: MENGAWAL PEMBANGUNAN RENDAH EMISI BERBASIS LAHAN DI SUMATERA SELATAN

From Policy into Action: Overseeing Land-based Low-Emission Development Planning in South Sumatra

31 PAVILIUN INDONESIA COP 21 PARIS: SEKELUMIT PEMBELAJARAN UPAYA INISIATIF AKSI MITIGASI LOKAL BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

Indonesian Pavilion at COP 21 Paris: Lessons Learned from Locally Mitigation Action Initiatives from Land-based sector in Indonesia

35 BIOGRAFI REGINA ARYANTI: OPTIMISME, KUNCI KEBERHASILAN DALAM BERKARYA

The Biography of Regina Aryanti
Optimism: the key to success in life and low-emissions development

Dukungan Kebijakan: Ujung tombak pengarusutaman pembangunan rendah emisi berbasis lahan di Indonesia

Policy Support: Leading-edge in mainstreaming land-based low emissions development in Indonesia.

Seiring dengan berjalannya proses revisi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua bekerja sama dengan World Agroforestry Centre yang didukung oleh pendanaan dari Uni Eropa dan DANIDA menyelenggarakan rangkaian pelatihan dan dialog kebijakan dengan tema **"Mewujudkan Pembangunan Hijau Melalui Penyusunan Rancangan Pembangunan Rendah Emisi di Provinsi Papua"**. Rangkaian kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi teknis perencana pembangunan di provinsi ini sekaligus memberikan masukan guna menyempurnakan dokumen aksi mitigasi yang telah ada.

Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Papua pun telah menyusun RAD-GRK. Proses ini berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan program Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi

In parallel with the revision process for the Regional Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (RAD-GRK) in Papua province and supported by funding from the European Union and DANIDA, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Papua province together with the World Agroforestry Centre held a series of training and policy dialogues on 'Towards Green Development Through the Low-Emission Development Planning in Papua Province' as the theme. This series of activities aimed to strengthen the technical capacity in development planning in the province as well as providing input to improve the existing mitigation action document.

Papua has already prepared its RAD-GRK, similar to other provinces. The process is based on coordinated work between the Bappeda of Papua Province and the Provincial Action Plan and Strategy to Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation and Conservation (SRAP REDD+) which is led by the

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus Konservasi (SRAP REDD+) yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan dan Badan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDLH). Meskipun penyusunan dokumen ini telah rampung akhir 2012 lalu, Pemerintah Provinsi Papua menyadari perlu adanya penyempurnaan.

"Proses penyusunan RAD-GRK Papua, targetnya dahulu yaitu JADI DULU, tapi tetap dirapikan, maka kini sedang direvisi," ujar Budiman Norotumilena yang menjadi koordinator kelompok kerja penyusunan dokumen RAD-GRK Provinsi Papua dari Bappeda. Rangkaian kegiatan pelatihan dan dialog kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sistem yang sudah terbangun sekaligus menggunakan momentum revisi ini untuk perbaikan dokumen RAD-GRK.

Rangkaian kegiatan ini berlangsung dari 16 sampai 20 November 2015 meliputi empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah Pelatihan Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Emisi yang dilaksanakan tanggal 16-18 November 2015. Hasil dari kegiatan ini selain berbentuk data dan analisa, juga berupa masukan teknis terhadap draft Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Papua.

Kegiatan kedua, yaitu Asistensi Sinkronisasi RAD-GRK Kabupaten dan Provinsi serta Seminar Penyadartahuan terkait Isu Perubahan Iklim. Bertujuan untuk mensinkronkan berbagai aksi mitigasi yang dihasilkan oleh setiap daerah kabupaten/kota dengan aksi mitigasi yang dihasilkan oleh provinsi dan begitu juga sebaliknya. Hasil sesi ini adalah kesepakatan bentuk-bentuk aksi mitigasi yang selaras antara kabupaten-provinsi untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di seluruh tanah Papua. Sedangkan sesi seminar dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu perubahan iklim dan *update* perkembangannya bagi seluruh kepala SKPD baik dari kabupaten maupun provinsi.

Kegiatan ketiga adalah Konsultasi Publik RAD-GRK kegiatan ini membahas draft revisi RAD-GRK Provinsi Papua, termasuk kemungkinan implementasi aksi-aksi mitigasi yang terdapat di dalamnya dapat dilaksanakan pada lingkup Provinsi Papua. Diawali dengan laporan perkembangan penyusunan RAD-GRK Provinsi Papua yang disampaikan oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Papua Bapak John Moesieri yang sekaligus mewakili Pokja Sektor berbasis lahan RAD-GRK Provinsi Papua. Pak John menyampaikan bahwa "Dengan menggunakan data historis, perubahan tutupan lahan pada hutan

Forestry Department and the Natural Resources and Environmental Management Board (BPSDLH). The provincial government of Papua is aware that the document needs improvement, even though it was completed in 2012.

"The initial target of the preparation of the RAD-GRK for Papua was 'TO JUST MAKE IT'; implemented and now the document is being revised" said Budiman Norotumilena from Bappeda, the coordinator of the work group which prepared the RAD-GRK for Papua province. The series of activities and policy dialogue were expected to strengthen the established system as well as using the momentum of the revision for the improvement of the RAD-GRK document.

The series of activities was conducted from 16 to 20 November 2015 and covered four activities. The first activity was 'Training of Low-Emission Development Strategy Preparation' which was held 16-18 November 2015. The activity aimed to strengthen the technical capacity of all district governments in Papua province in the preparation of their regional low-emission development strategies. The results of this activity were not only data and analysis, but also technical input for the Regional Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (RAD-GRK) draft in Papua province

The second activity—"Technical Assistance in Synchronizing the District and Provincial RAD-GRK" and the 'Awareness Seminar on Issues related to Climate Change'—was held aimed to synchronise various mitigation actions which had been developed by every district/city with provincial mitigation actions and *vice versa*. The result of this session was agreement on the forms of sustainable mitigation actions between districts and the province to be further implemented in all areas in Papua. The seminar was held to improve understanding on climate change issues and development updates for all heads of unit agency (SKPD), at both the district and provincial levels.

The third activity is the Public Consultation on RAD-GRK, this activity discuss the draft revision of RAD-GRK Papua Province, including the possibility of implementing mitigation actions contained in it may be implemented in the scope of Papua province. Starting on the development of RAD-GRK Papua province reports by the representative of Regional Development Planning Agency (Bappeda) Papua Province Mr. John Moesieri which also representatives of RAD-GRK Papua Province working group. Mr. John





photo: Anjar Asmara/World Agroforestry Centre



photo: Anjar Asmara/World Agroforestry Centre



photo: Anjar Asmara/World Agroforestry Centre

primer termasuk tinggi mengingat potensi yang ada termasuk tinggi di lahan tersebut dan sumber emisi terbesar berasal dari kawasan hutan produksi”.

Konsultasi publik dilanjutkan dengan pemaparan tiga kabupaten dampingan proyek ParCiMon dan LAMA-I di Papua yaitu Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Pemaparan tersebut kemudian mendapatkan masukan baik dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten lainnya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyampaikan bahwa titik awal yang baik sudah dimulai dengan kelembagaan yang telah terbentuk di tingkat provinsi, terkait rencana aksi mitigasi, pemerintah provinsi dan kabupaten akan meningkatkan koordinasi.

Kegiatan konsultasi publik ini menjadi wahana yang tepat untuk berdiskusi dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antara kabupaten dan provinsi. Poin penting dari diskusi ini adalah pembangunan rendah emisi perlu memperhatikan kearifan lokal termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Serta perlunya payung hukum atas kegiatan penyusunan rencana aksi mitigasi di tingkat kabupaten, agar pemerintah daerah yang belum menyusun rencana aksi mitigasi dapat memprioritaskan untuk kegiatan ini karena sudah memiliki payung hukum sekaligus menjadi pedoman dalam upaya menyelaraskan dengan rencana aksi ditingkat provinsi.

said that “by using historical data, land cover change on primary forest land is high, considering the high potential on the certain land and the largest source of emissions originating came from the production forest area”.

Public consultations continued with the presentation of three districts assisted projects ParCiMon and LAMA-I in Papua, Merauke, Jayawijaya and Jayapura. Provincial Government of Papua conveyed that this is a good starting point, institutions that has been established at the provincial level, related to mitigation actions, provincial and district governments will increase coordination.

Public consultation is becoming a fruitful event to discuss as well as to improve coordination and communication between the district and the province. An important point of this discussion is the low-emission development need to consider local knowledge including boost the economic growth and the livelihood of local communities. The need for legal platform for the activities of mitigation action planning at the district level, so that local governments have a certain mandate to develop mitigation action.

Regency Asmat said that the mitigation action plan which will be driven into local development plans require regulation / regulatory and understanding for all parties. Low emissions development policy is an

Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa Rencana aksi mitigasi yang akan didorong ke dalam rencana pembangunan daerah memerlukan perda/regulasi dan juga pemahaman bagi semua pihak, sehingga tidak hanya yang paham saja yang melakukan tapi juga oleh semua pihak. Kebijakan pembangunan rendah emisi ini merupakan kebijakan yang penting, oleh sebab itu pelaksanaan di tingkat kampung perlu mendapat perhatian untuk melakukan sosialisasi dan membangun pemahaman terlebih dahulu

Poin penting lainnya adalah bahwa sumber daya manusia di Papua sarat dengan kearifan lokal dan tentu saja tidak kalah penting dengan mempertahankan jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bapak Dr. Suyanto mengungkapkan bahwa "Proyek ParCiMon dan LAMA-I sudah menuju ke arah yang tepat, kegiatan penurunan emisi harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, batas toleransi yang disepakati mengenai kegiatan-kegiatan penurunan emisi yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah". Proses nesting (sinergi dan sinkronisasi rencana aksi mitigasi antara provinsi dan kabupaten) ini yang pertama kali dilakukan di Provinsi Papua. Kedepannya provinsi dapat terus mengawal proses ini sehingga terus terbangun kesepahaman dan komitmen untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Untuk memperkuat kegiatan konsultasi publik tersebut, pada hari yang sama juga dilakukan kegiatan keempat, yaitu Dialog Pemangku Kebijakan. Sesi dialog kebijakan ini dilakukan untuk memfasilitasi dialog antara pihak kabupaten dengan pihak pemegang kebijakan di tingkat Provinsi Papua, terutama yang terkait dengan isu-isu pembangunan hijau. Sesi dialog dihadiri oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bapak Ellia Loupatty, pelaksana program ParCiMon dan LAMA-I dan perwakilan pemerintah daerah.

Beberapa poin penting yang didiskusikan pada pertemuan tersebut adalah bahwa proyek ParCiMon dan LAMA-I melaporkan mengenai kegiatan proyek yang telah dilakukan sudah sejalan dengan apa yang dilakukan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Tersampainya kebutuhan dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk dapat menyusun rencana aksi mitigasi serta mekanisme pelaporan (PEP) secara berkala. Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten membutuhkan dukungan dari pemerintah

important policy, and therefore the implementation at the village level need attention to socialize and build understanding in advance

Another important point is that human resources in Papua loaded with local knowledge and certainly as important as to maintain ecosystem services and biodiversity. Dr. Suyanto said that "the project ParCiMon and LAMA-I was headed on the right direction, emission reduction activities should be accompanied by economic growth, tolerance limits on the activities of emissions reductions could affect economy growth and will becomes the government's rights to decide". Nesting process (synergy and synchronization mitigation actions between provinces and districts) is the first being conducted in the province of Papua. In the future the province can continue to oversee this process so it continues to build understanding and commitment to mitigate climate change issues.

To strengthen the activities of the public consultation, on the same day also conducted a Policy Dialogue, to facilitate dialogue between the districts with the policy maker at the Papua Province, particularly in relation to the low-emission development issue. The attendees to this meeting was the second assistant, regional secretary Papua Province, Mr. Ellia Loupatty, representatives of both ParCiMon and LAMA-I program, and representatives of Papua local government.

The important points were being highlighted at the meeting. The project ParCiMon funded by the European Union and LAMA-I funded by the Danish International development Agency (DANIDA) reported the activities carried out by the project has already in line with what is done in the development of the Regional Action Plan in reducing greenhouse gas emission reduction (RAD-GRK). The availability of information regarding the needs of policy support from the provincial government as the platform for local government in order to enable the mitigation action plan and reporting mechanisms (PEP) periodically.

In this case the district would require support from the provincial government in terms of local capacity building, as well as the need for the allocation of funding through the internalization scheme plan. The local government also proposed that the Governor rule No. 9 of 2013 to be revised to accommodate it.

provinsi dalam hal peningkatan kapasitas lokal, serta kebutuhan untuk alokasi pendanaan melalui internalisasi skema rencana yang telah disusun ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah juga mengusulkan bahwa aturan Gubernur Nomor 9 tahun 2013 untuk direvisi guna mengakomodasi hal tersebut.

Selain itu dibutuhkan sebuah lembaga atau forum multipihak di tingkat provinsi yang dapat mengawasi pelaksanaan RAD-GRK Papua. Bapak Ellia Loupatty mengungkapkan bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat "Langkah pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah konsolidasi dengan kepala badan satuan lokal. Kami juga akan merencanakan pertemuan dengan kepala SKPD dari sektor berbasis lahan di Provinsi Papua untuk mencari komitmen dalam mewujudkan pelaksanaan RAD-GRK Papua, serta mendapatkan masukan dari poin revisi peraturan gubernur".

Selain untuk memperkuat kapasitas perencanaan dan pelaksana pembangunan serta sinergi berjenjang di Papua, rangkaian acara tersebut menjadi momen untuk mempertegas kembali komitmen semua pihak untuk melindungi hutan di Papua. Bapak Budiman dari Bappeda Provinsi Papua menambahkan "Papua mungkin menjadi satu-satunya pulau besar di Indonesia yang masih memiliki luasan hutan cukup besar, maka perlu komitmen untuk menjaga jumlah luasan hutan di pulau ini. Utamanya kini, cobalah jaga hutan. Hutan merupakan urusan semua pihak Papua, maka untuk semua, jagalah hutan Papua!" seru Pak Budiman.

In addition there is another requirement for the availability of an institution or a multi-stakeholder forum at the provincial level to oversee the implementation of the RAD-GRK Papua. Mr. Ellia Loupatty revealed that the meeting was very useful "first step to be taken by the provincial government of Papua is consolidated with the head of the local unit (SKPD). We will also plan a meeting with the heads of SKPD from land-based sector in Papua province to seek commitment in realizing the implementation of RAD-GRK Papua, and get feedback from the revised regulation points governor". In addition to strengthening the skills of development planners, increasing the capacity of implementers and achieving nested approach in Papua, the series of activities provided the momentum to re-affirm the commitment of all parties to protect forest in Papua. Mr. Budiman said that "Papua is probably the only large island in Indonesia that still has extensive forest areas; therefore, the commitment to protect the forest area on the island needs to be maintained. Let's make the protection of forest become our priority, it is the responsibility of all people in Papua. Therefore, let's protect Papua forest!" exclaimed Mr. Budiman.





photo: Arizka Mufida/World Agroforestry Centre

Lokakarya Nasional: Membumikan Pembangunan Rendah Emisi Berbasis Lahan di Indonesia

National Workshop: Socialising Land-based
Low-emission Development in Indonesia

Pembangunan rendah emisi pada akhirnya harus menjadi pekerjaan bersama bangsa Indonesia.

Penglibatan publik sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengarusutamaan isu lingkungan dalam kebijakan pembangunan perlu dilakukan sedini mungkin. Langkah ini dapat dimulai dengan melakukan sinergi berjenjang serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan rendah emisi.

Pentingnya dua aspek ini menjadi salah satu pelajaran berharga yang berhasil dipetik dari kegiatan lokakarya nasional **"Mewujudkan Sinergi Berjenjang dari Proses Pembelajaran Penyusunan Perencanaan Pembangunan Rendah Emisi Berbasis Lahan di Indonesia"** yang diselenggarakan di Jakarta, 17-18 Februari 2016 lalu. Lokakarya pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN-Bappenas) bersama mitra kerja pembangunan di bawah program *Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I)* dan program *Participatory monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions development strategies (ParCiMon)* bertujuan memberikan wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran antar daerah dengan pengambil kebijakan kunci, praktisi dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor lahan.

Sinergi berjenjang merupakan faktor yang sangat esensial untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Rencana penurunan emisi rumah kaca telah terumuskan dengan baik pada level nasional dan provinsi. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 telah memberi payung hukum untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sedangkan pada level provinsi, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, pemerintah provinsi telah merumuskan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya dokumen serupa dapat juga dipunyai oleh pemerintah di tingkat kabupaten yang berinteraksi langsung dengan penerapan kebijakan pembangunan di masing-masing daerah?

Pada celah inilah program LAMA-I dan ParCiMon bekerja. Kedua program ini memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen penurunan emisi di tingkat kabupaten. Program LAMA-I bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Jayawijaya, Jayapura, dan

Low-emissions development must become a national commitment for Indonesians as one nation. The act of involving the public as key stakeholders in mainstreaming environmental issues into development policies needs to be implemented as early as possible. This step can be started by applying the "nested" approach and generates the active participation of society in monitoring and evaluating low-emission development planning.

The importance of these two aspects was one of the valuable lessons learned from the successful national workshop "Creating Nested Approach from the Learning process of Land-based Low-emission Development Planning in Indonesia" held in Jakarta on 17-18 February 2016. The workshop was organized by the Ministry of National Development Planning (PPN-Bappenas) together with development partners under the Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) and the Participatory monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) programmes aimed to provide a forum to share inter-regional experiences and learning processes among key policy makers, practitioners and other development stakeholders in the process of planning low-emission development in the land-based sector.

Nested approach is an essential factor in materializing Indonesia's commitment to reducing greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emission reduction planning has been carefully formulated at both the national and provincial levels. Presidential Decree No. 61 in 2011 gave legal protection for the implementation of the National Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (locally known as RAN-GRK). Meanwhile, at the provincial level, provincial government in coordination with the Regional Development Planning Agency (Bappeda) have formulated a Regional Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (know as RAD-GRK locally). The next question is how can a similar document be owned by the government at the district level and interact directly with the application of development policies in each region?

Filling this gap is where the LAMA-I and ParCiMon programmes come in. Both programmes provide support for local government in preparing emission reduction documents at the district level. The LAMA-I programme is being applied in Musi Banyuasin, Banyuasin and Musi Rawas districts in the province of South Sumatra as well as in Jayawijaya, Jayapura and Merauke districts in Papua Province. The ParCiMon programme is working on the preparation of locally

Merauke. Sedangkan program ParCiMon bekerja di Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke dengan fokus utama menyusun aksi mitigasi daerah dan meningkatkan kapasitas daerah untuk dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi aksi mitigasi.

Selain membagi pengalaman berjalannya dua proyek tersebut di masing-masing wilayah, lokakarya pembelajaran nasional ini juga menekankan tentang pentingnya sinergi berjenjang, yaitu sinergi antara rumusan aksi mitigasi di tingkat kabupaten dengan dokumen serupa pada level provinsi dan nasional.

"Keberhasilan untuk melaksanakan pembangunan rendah emisi berbasis lahan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program pembangunan terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan antar sektor baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal," ujar Bapak Prof. Dr. Rizaldi Boer Executive Director pada CCROM-SEAP IPB, mitra pelaksana program LAMA-I.

Lokakarya nasional ini diawali dengan diskusi menarik yang dikemas dalam konsep talk show yang dipandu oleh moderator ternama Bapak M. Farhan dengan narasumber Deputy Menteri PPN/Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Ibu Dr.

mitigation action by enhancing the local capacity to monitor and evaluate the implementation of mitigation actions as its main focus in Jayawijaya, Jayapura and Merauke districts.

In addition to share experiences about the implementations of the two projects in each area, the national learning workshop also stressed the importance of nested approach, which nested approach defines as the synergy in the formulation of mitigation actions at the district level with similar documents at the provincial and national levels.

"The success rate in implementing land-based low-emission development is highly determined by the ability to synergise, synchronise and integrate related development programmes with the management of land and forest resources between sectors, vertically (national and regional) as well as horizontally," said Mr. Prof. Dr. Rizaldi Boer, Executive Director on CCROM-SEAP IPB, implementing partners of LAMA-I programme.

The national workshop began with an interesting discussion which was presented in the style of a talk



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



photo: Aniza Mufida/World Agroforestry Centre



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ibu Dr. Ir. Nur Masripatin M.For. Sc, Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) bidang perubahan iklim Bapak Dr. Najib Asmani, Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Bapak Ir. Daswil Bakar, M.MT, ICRAF Indonesia Country Coordinator, Ibu Dr. Sonya Dewi, dan Direktur Eksekutif CCROM-SEAP IPB Bapak Prof. Dr. Rizaldi Boer.

Talkshow interaktif ini mengulas bahwa mitigasi perubahan iklim tidak hanya terbatas pada satu aspek saja namun lebih kepada keseluruhan perubahan perilaku masyarakat. Rencana penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang di upayakan oleh seluruh pihak untuk mencapai target penurunan emisi bergantung pada perilaku seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal ini juga mengarah kepada kebutuhan untuk peningkatan koordinasi antar sektor dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun regional.

Pencapaian target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, bantuan luar negeri pun tak luput sebagai salah satu bentuk dukungan untuk mencapai komitmen tersebut. "Kerjasama dengan berbagai pihak harus tetap dilaksanakan dalam kerangka nasional yang sudah dibangun, dan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan atas kerjasama tersebut juga diharapkan untuk dapat diinformasikan kepada Sekretariat RAN-GRK untuk dapat diverifikasi sehingga nantinya **docking** nya tetap ke nasional", merupakan salah satu point penting yang disampaikan oleh Ibu Endah Murniningtyas ketika ditanya bagaimana merespons banyaknya dukungan multilateral mitigasi perubahan iklim.

show hosted by a famous moderator, Mr. M. Farhan, with the following key speakers: the Deputy Minister of PPN/Bappenas for Maritime and Natural Resources Department, Mrs. Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc; the General Director of Climate Change of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Mrs. Dr. Ir. Nur Masripatin M.For.Sc; Expert Staff to the Governor of South Sumatra for climate change department, Mr. Dr. Asmani Najib; Head of Regional Development Planning Agency of Merauke district, Mr. Ir. Daswil Grill, M.MT; the ICRAF Indonesia Country Coordinator, Mrs. Dr. Sonya Dewi; and the Executive Director of CCROM-SEAP IPB, Mr. Prof. Dr. Rizaldi Boer.

The mitigation actions of climate change was not just about one aspect, but more on the overall change in people's behaviour, as discussed in the interactive talk show. The greenhouse gas emission reduction plan which has been developed by all parties to achieve the emission reduction target relies on the behaviour of the people of Indonesia as a nation. It also leads to the need for increased coordination between sectors and institutions, both at the national and regional levels.

The efforts to achieve the national target in reducing greenhouse gas emissions require the joint work of various parties; foreign aid is one of the forms of support to achieve that commitment. "Cooperation with various parties must continue within the established national framework, and the results of efforts undertaken on such cooperation are also expected to be submitted to the Secretariat of RAN-GRK to be verified and to keep the docking at the national level", is one of the important points that was delivered by Mrs. Endah Murniningtyas when she was asked how to respond to the numerous sources of multilateral support on climate change mitigation.



Ibu Nur Masripatin juga turut menambahkan mengenai Kelembagaan dan Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Sistem Monitoring, reporting and Verification (MRV) “Untuk membangun sistem MRV yang baik membutuhkan ketersediaan data yang valid yang diukur, dilaporkan dan diverifikasi secara berkala. Daerah dengan kinerja yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup harus disediakan oleh insentif dengan parameter yang terukur dan dibantu dalam melaksanakan program pembangunan daerah”.

Proses sinergi berjenjang sendiri sebenarnya sudah dilakukan dengan bentuk lokakarya Provinsi di Papua dan Sumatera Selatan. Lokakarya provinsi tersebut telah menghasilkan panduan bagi pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan melakukan upaya yang terintegrasi sekaligus menyoroti potensi proses sinergi berjenjang. Rangkaian pertemuan telah dilakukan untuk dapat memungkinkan terjadi dialog dan negosiasi dua arah yang dapat mengarah kepada implementasi upaya nyata menuju pembangunan hijau yang berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menjadi semakin relevan setelah diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pembagian Peran antara Pemerintahan Pusat dan Daerah terhadap implementasi aksi mitigasi di daerah.

Selain menyorot tentang sinergi berjenjang serta monitoring dan evaluasi partisipatif, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah perlunya payung hukum, seperti peraturan gubernur, yang mewajibkan pengembangan dan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim di setiap kabupaten. Kegiatan ini juga melihat bahwa dukungan pendanaan swasta dan internasional akan memberikan dampak yang lebih baik untuk mendukung rencana pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca.

Ibu Endah Murtiningtyas di akhir sesi dialognya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada semua pihak bahwa “Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perubahan iklim memerlukan Konsistensi yang sangat terkait dengan aspek komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya dalam komunikasi langsung namun juga dalam bentuk kebijakan, **compliance** juga perlu kita tingkatkan, Permasalahan ini juga tidak mudah, dengan tantangan yang cukup banyak, namun harus tetap optimis dengan tantangan yang ada. Perjuangan untuk penurunan emisi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ini memerlukan *endurance*, merupakan pekerjaan sepanjang masa”.

Mrs. Nur Masripatin also added issues regarding the development of institutional and infrastructure to support the development of the Monitoring, Reporting and Verification (MRV) system, “It takes the availability of valid data which is measured, reported and verified periodically to build a good MRV system. Regions with good performance in environmental management should be given incentives through measured parameters and assistance in implementing the regional development programme”.

The “nesting” process itself has been conducted in a form of provincial workshop prior the national event. Another form of nesting process has also been conducted in several high-level meetings, dialogues and workshops in both provinces. The provincial workshops have produced guidelines for district and provincial governments to increase the functions of coordination and to integrate efforts while highlighting the potential phased synergy process. A series of meetings was used to allow two-way dialogue and negotiation which can lead to true implementation efforts towards sustainable green development in Indonesia. This has become relevant after the issuance of Law No. 23 in 2014 on the division of roles between central and regional government in the implementation of regional mitigation actions.

Several recommendations resulted from this activity, besides highlighting the nesting approach and participatory monitoring and evaluation. Among them is the need for appropriate legislated protection, such as a governor’s regulation which requires the development and implementation of climate change mitigation actions in each district. This activity also noted that private funding and international support will provide greater impact to support the government’s plan to reduce greenhouse gas emissions.

At the end of her dialogue session, Mrs. Endah Murtiningtyas delivered a statement addressing all parties, “Consistency which is closely related to communication aspects is required in solving the problems related to climate change. The type of communication needed is not only in the form of direct communication, but also in the form of policies; compliance also needs to be improved. It is not an easy problem to solve, given the many obstacles, but we need to remain optimistic. The struggle for the reduction of emissions within the framework of sustainable development requires endurance—it’s a life-time’s work”.

Festival Iklim 2016: Mengatasi Perubahan Iklim Bukan Sekedar Dokumen Politik

Climate Festival 2016: Addressing Climate Change is More Than Political Documents



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di negara ini tidak bisa dilakukan sambil lalu. Semua pemangku kepentingan perlu melakukan usaha yang sistematis, terus-menerus dan menyebar ke seluruh pelosok nusantara.

"Upaya dan strategi [untuk mengatasi perubahan iklim] di negara kita yang sangat luas dan banyak penduduknya tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan banyak ketekunan dan persistensi untuk terus-menerus dan tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa, tetapi kita harus masuk ke kota-kota di pulau-pulau yang lain," demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution saat membuka Festival Iklim yang digelar awal Februari lalu di Jakarta Convention Center.

Indonesia has a huge territory and a very large population. These conditions demand that efforts to mitigate climate change in this country should be done in the greatest effort. All stakeholders need to commit to systematic, continuous and wide-spread efforts in all areas in the archipelago.

"Efforts and strategies [to address climate change] in our huge and populous country cannot be done half-heartedly. It takes a lot of perseverance and persistence and they should not only be done in Jakarta or major cities in Java, but also in other cities on other islands," said the Coordinating Minister for Economic Affairs, Mr. Darmin Nasution, when opening the Climate Festival held in early February at the Jakarta Convention Center.

The Indonesian government has committed to providing a substantial contribution to efforts to reduce greenhouse gas emissions since the



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



photo:

Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk siap berkontribusi besar pada upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB ke 21 (COP 21) di Paris, 21 November 2015, mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Ini adalah komitmen penurunan emisi dengan usaha mandiri Indonesia atau sering disebut *business-as-usual scenario*. Jika mendapat dukungan internasional, komitmen penurunan emisi yang diberikan Indonesia menjadi lebih besar lagi, yaitu 41 persen.

"Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi, menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita, menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka." demikian pesan Bapak Joko Widodo saat itu.

Festival Iklim yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 1-4 Februari 2016 merupakan bentuk penegasan komitmen Indonesia dalam COP 21. Salah satu poin utama kesepakatan COP 21 saat itu adalah untuk upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat dalam rangka menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius. Ini pula yang melatari pemilihan tema Festival Iklim 2016, yaitu **"Dibawah 2 Derajat untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang"**.

"Festival iklim ini bertujuan menyatukan visi bersama dalam melaksanakan agenda perubahan iklim yang harus dilihat baik dari sisi perintah undang-undang untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi warga

beginning. President Of Indonesia Mr. Joko Widodo expressed this desire in his speech at the 21st United Nations World Summit (COP 21) in Paris, November 21, 2015, announcing that Indonesia had made the commitment to reduce its emissions by 29 percent by 2030. This is an independent commitment to reduce emissions in what is often called the "business-as-usual" scenario. If Indonesia gains international support, this emission reduction commitment can be increased to 41 percent.

"I expect all of us to be part of the solution, making the earth a better and prosperous place to live for our children and grandchildren." This was the message of President Joko Widodo at that time.

The Climate Festival held by the Ministry of Environment and Forestry on 1-4 February 2016 was a form of affirmation of Indonesia's commitment to COP 21. One of the main points of the COP 21 agreements is mitigation for rapid emission reduction in order to keep the global temperature rise in this century below 2° Celsius. This was what has underlain the theme selection for Climate Festival 2016 as "Below 2 Degrees for the Welfare of People and the Next Generation".

"This climate festival is aimed at uniting behind a common vision in implementing the climate change agenda which has to be seen both in terms of legislative order to provide a good environment for citizens along with the climate control responsibility agenda in line with the needs of the world," said the Minister of Environment and Forestry, Mrs. Siti Nurbaya Bakar, in her opening speech at Climate Festival 2016.



Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



photo: Melinda Firds/World Agroforestry Centre

negara bersamaan dengan adanya tanggung jawab agenda pengendalian iklim sesuai kebutuhan dunia” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya pada pembukaan Festival Iklim 2016.

Festival Iklim 2016 yang didukung Pemerintah Norwegia dan UNDP REDD+ Programe menjadi wadah untuk menyampaikan poin-poin dalam COP 21 kepada para pemangku kepentingan terkait perubahan iklim di Indonesia. Festival ini diikuti oleh para pelaku dan pemerhati isu perubahan iklim baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintah seperti LSM dan institusi penelitian di Indonesia. Lebih dari 75 lembaga turut berpartisipasi. Agenda yang diusung festival ini termasuk seminar, diskusi interaktif, pameran, dan pameran praktik pengendalian perubahan iklim serta berbagai kegiatan yang terbuka untuk umum lainnya.

Pada sesi diskusi, pembicara yang hadir memaparkan informasi dan gagasan mengenai program-program pengendalian perubahan iklim. Selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia YM.Stig Traavik turut menjadi pembicara utama (**keynote speaker**) dalam acara tersebut.

World Agroforestry Center (ICRAF) turut berkontribusi pada kegiatan festival iklim 2016 dengan menjadi pengisi pameran yang di gelar sebagai bagian dari kegiatan nasional ini. Booth ICRAF yang berlokasi di areal utama ini menampilkan informasi mengenai tiga proyek kemitraan yang terkait mitigasi perubahan iklim yang ada di Indonesia saat ini. Ketiga

Climate Festival 2016, which was supported by the Norwegian Government and the UNDP REDD+ Programme, was a forum to convey the points of the COP 21 to the stakeholders related to climate change in Indonesia. The festival was attended by actors and observers of climate change issues from both government and non-government elements such as NGOs and research institutions in Indonesia. More than 75 institutions participated. Agendas promoted by this festival included seminars, interactive discussions, exhibitions and a climate change control practices fair, as well as a variety of activities which were open to the public.

In the discussion session, the speakers presented information and ideas on climate change control programmes. In addition to the Coordinating Minister for Economic Affairs and the Minister of Environment and Forestry, the Norwegian Ambassador to Indonesia, HE Mr. Stig Traavik, participated as a keynote speaker in the event.

The World Agroforestry Centre (ICRAF) was being part of this national event, by contributing to the exhibition held as part of the climate festival event. The ICRAF booth, which was located in the main area, displayed information regarding its three partnership projects related to current climate change mitigation in Indonesia. The three projects are: 1) Participatory Monitoring by Civil Society of Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategies (ParCiMon) which is funded by the European Union; 2) the Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) project which is funded by the Danish International Development Agency (DANIDA); and 3) the Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Actions In Indonesia which is funded by

proyek tersebut adalah *Participatory Monitoring by Civil Society of Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategies (ParCiMon)* yang didanai oleh Uni Eropa; proyek *Locally Appropriate Mitigation Actions In Indonesia* (LAMA-I) yang didanai oleh Danish International Development Agency (DANIDA); dan *Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Actions In Indonesia* yang didanai oleh BMUB Germany.

Beragam hasil pembelajaran dari ketiga proyek tersebut dikemas dalam bentuk **fact sheet, brief note, x-banner**, poster dan video. **Booth** ini juga mengadakan kuis untuk menarik pengunjung dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selama empat hari pameran, **booth** ini menerima 300 pengunjung. Kuis dengan hadiah menarik digelar setiap harinya, dengan pertanyaan mengenai ketiga proyek yang dipamerkan berhasil menarik banyak pengunjung untuk mengunjungi booth ICRAF.

Namun demikian, festival ini tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga pemerintah dan pemerhati lingkungan, tetapi juga berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Acara yang disajikan pun tidak hanya seminar, diskusi, dan pameran, tetapi juga kegiatan lain yang melibatkan pengunjung dari masyarakat umum, seperti lomba debat untuk kalangan mahasiswa, sosialisasi 3R (**reuse, reduce, and recycle**), dialog interaktif untuk siswa, lokakarya media sosial, lokakarya infografis, hingga lomba **showcase** terbaik. Tujuannya adalah untuk mengemas isu perubahan iklim ke dalam bahasa sederhana, bahasa yang gampang dicerna oleh semua pihak. "Perubahan iklim itu bukan hanya sebuah kertas, bukan hanya sebuah komitmen politik, tetapi bagaimana itu bisa dipahami dengan berbagai bahasa," ungkap Ibu Siti Nurbaya

BMUB Germany.

The various learning outcomes of the three projects were packaged into fact sheets, brief notes, x-banners, posters and videos. The booth also held a quiz to attract the school students and university students among the visitors. The booth hosted 300 visitors during the four-day exhibition. A pop-quiz regarding the three projects with its interesting merchandises as the prizes to give away, has drawn numerous visitors to visit ICRAF booth.

Nevertheless, this festival was certainly not reserved only for government agencies and environmentalists, as there were various elements present, from school and university students to the public in general. The events presented not only included seminars, discussions and exhibitions, but also other activities involving public visitors, such as a debate competition for university students, socialisation of the 3Rs (reuse, reduce and recycle), an interactive dialogue for school students, social media and infographic workshops and a best-showcase competition. The goal was to pack climate change issues into simple language, that can be easily understood by all parties. "Climate change is not just a piece of paper, nor a political commitment, but how it can be understood in various languages," said Mrs. Siti Nurbaya.



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



photo: Melinda Firds/World Agroforestry Centre



Mencetak Kader Pembangunan Hijau Berbasis Lahan di Sumatera Selatan

Regeneration of Experts in land-based Green Development in South Sumatra.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) menyelenggarakan identifikasi calon dan pelatihan Tenaga Kader Ahli (TKA) Pembangunan Hijau di Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya kelanjutan kaderisasi tenaga ahli perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan.

Memasuki tahun ketiga implementasi program LAMA-I di Sumatera Selatan, serangkaian kegiatan pendampingan baik teknis maupun non-teknis telah dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah daerah yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) untuk dapat menyusun aksi mitigasi lokal sebagai langkah awal perencanaan pembangunan rendah emisi di Sumatera Selatan.

Sejumlah pencapaian telah didapatkan dari masing-masing kabupaten dampingan program LAMA-I, pencapaian tersebut sejalan dengan pembelajaran yang didapatkan. Salah satu pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan program LAMA-I ini adalah seringnya proses rotasi yang terjadi di struktur pemerintahan, berdampak pada meningkatnya potensi hilangnya investasi terhadap sumber daya manusia yang telah mengikuti proses kegiatan

The Regional Development Planning Agency (Bappeda) of South Sumatra Province in collaboration with the Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) programme held an identification and training session for Candidates as Green Development Experts (known as Tenaga Kerja Ahli/TKA locally) in South Sumatra. The purpose of the activity was to ensure the continuation of the regeneration of environmentally sound experts in development planning in South Sumatra.

Entering the third year of LAMA-I program implementation in South Sumatra, a series of support activities, both technical and non-technical, have been conducted in order to strengthen the capacity of local governments that are members of the working group (Pokja) to develop local mitigation action as the first step in planning low-emission development in South Sumatra.

There have been a number of achievements in each district assisted by the LAMA-I programme, taking advantage of lessons learned. One of the lessons from the implementation of the LAMA-I program was that the frequent rotation process in the government structure has had an impact on the potential loss in human resources investment of those who have participated in the capacity building activities, as most members of the Pokja have been sourced from governmental elements.

penguatan kapasitas dimana sebagian besar anggota Pokja berasal dari unsur pemerintah.

Program LAMA-I yang didanai oleh Royal Danish Embassy (DANIDA) dan didukung oleh Bappenas dengan pelaksana kegiatannya World Agroforestry Centre (ICRAF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific- Bogor Agricultural University (CCROM-IPB) juga akan berakhir pada tahun 2017, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang telah dibekali pengetahuan, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kegiatan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat berkelanjutan saat proyek berakhir?

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama dengan program LAMA-I menjawab tantangan ini dengan melakukan upaya kaderisasi tenaga ahli perencanaan pembangunan rendah emisi. Upaya kaderisasi ini sudah mulai dilaksanakan dengan mulai mengidentifikasi calon tenaga kader ahli (TKA). Kegiatan identifikasi calon TKA ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang para pihak yang berkeinginan menjadi calon TKA baik yang berasal dari akademisi maupun organisasi masyarakat sipil.

Melalui kegiatan identifikasi TKA didapatkan informasi bahwa isu pembangunan rendah emisi ternyata cukup menarik perhatian dan para peserta calon TKA. Dengan latar belakang calon TKA yang cukup bervariasi diharapkan dapat memaksimalkan proses kaderisasi ini. Calon TKA yang telah teridentifikasi ini berjumlah 35 orang terdiri dari 27 orang akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palembang dan 8 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja terkait dengan isu perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi.

Proses kaderisasi dilanjutkan dengan melatih calon TKA yang sudah diidentifikasi ini dengan melakukan pelatihan tahap I yang digelar pada bulan Maret 2015 selama lima hari di Hotel Aston, Palembang. Pelatihan ini merupakan kegiatan yang cukup penting dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas teknis anggota TKA Sumatera Selatan untuk dapat merencanakan pembangunan rendah emisi pada sektor berbasis lahan.



photo: Asri Joni/World Agroforestry



photo: Asri Joni/World Agroforestry



photo: Arga Pandiwijaya/World Agroforestry

The LAMA-I programme, is funded by the Royal Danish Embassy (DANIDA) and supported by Bappenas with the following implementers: World Agroforestry Centre (ICRAF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific- Bogor Agricultural University (CCROM-IPB) will end in 2017. This raises the question of the management of those people who hold the human resources knowledge on developing planning activities which are environmentally sound and how these resources can be sustained when the project ends?

The local government of South Sumatra, represented by Bappeda together with the LAMA-I programme answered this challenge by conducting sessions on the regeneration of experts in low-emission development planning. This regeneration effort started by identifying the TKA candidates. The activity was intended to gather information about the parties who wanted to become TKA candidates from both academic and civil society organisations.

Melalui pelatihan ini para anggota TKA diharapkan dapat membangun kemampuan teknis dalam perencanaan penggunaan lahan, membangun kemampuan dasar dalam merencanakan dan memperkirakan konsekuensi dari upaya penurunan emisi pada berbagai sektor pembangunan, menghitung reference emission level dan membangun rencana strategi pembangunan rendah emisi dan pada akhirnya para anggota TKA ini dapat menyusun rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas TKA.

Pada pelatihan tahap I ini para anggota TKA diperkenalkan dengan metode yang digunakan dalam program LAMA-I yaitu Land Use Planning for Multiple Environmental Service (LUMENS) sebagai kerangka kerja dan alat bantu perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan berbagai jasa lingkungan. Proses pelatihan tidak hanya disajikan dengan presentasi saja, tetapi juga melalui pengenalan perangkat lunak, praktik langsung, latihan, presentasi serta diskusi kelompok. Dengan menggunakan beragam metode ini, diharapkan peserta pelatihan dapat benar-benar menguasai kemampuan teknis untuk menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan untuk mendukung pembangunan daerah yang rendah emisi.

Kaderisasi TKA seperti yang dilakukan oleh Bappeda Sumatera Selatan dan LAMA-I sangat penting mengingat pemerintah daerah menjadi ujung tombak program penurunan emisi nasional yang telah direncanakan Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada 2009, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 berdasarkan laporan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) pada COP 21 di Paris.

Mengingat perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus, kegiatan kaderisasi tentunya juga tidak boleh berhenti dilakukan. Pasca program LAMA-I berakhir pun, pemerintah Sumatera Selatan diharapkan sudah memiliki program kaderisasi reguler untuk memastikan bahwa tenaga ahli bidang pembangunan berkelanjutan selalu tersedia di provinsi ini.

Information regarding the high interest in low-emission development existing in the TKA candidates was obtained through an identification activity. Optimisation of the regeneration process is necessary given the varied backgrounds of the TKA candidates. In total, 35 TKA candidates have been identified, consisting of 27 academics from various universities in Palembang and 8 candidates from various civil society organisations whose work is related to the issues of climate change and low-emissions development.

The next step of the regeneration process was providing training to the TKA candidates. The first phase of the training was conducted over five days in March 2015 at the Aston Hotel, Palembang. The training was necessary in order to strengthen the technical capacity of the TKA members in South Sumatera to plan low-emission development for the land-based sector.

It is expected that after receiving the training, the TKA members are able to develop technical capacity in land use designation, to build basic skills in planning and estimating the consequences of emission reduction efforts in various sectors of development, to calculate reference emission levels and to establish a strategic plan of low-emission development, and ultimately to draw up a follow-up plan as part of efforts to strengthen their capacity.

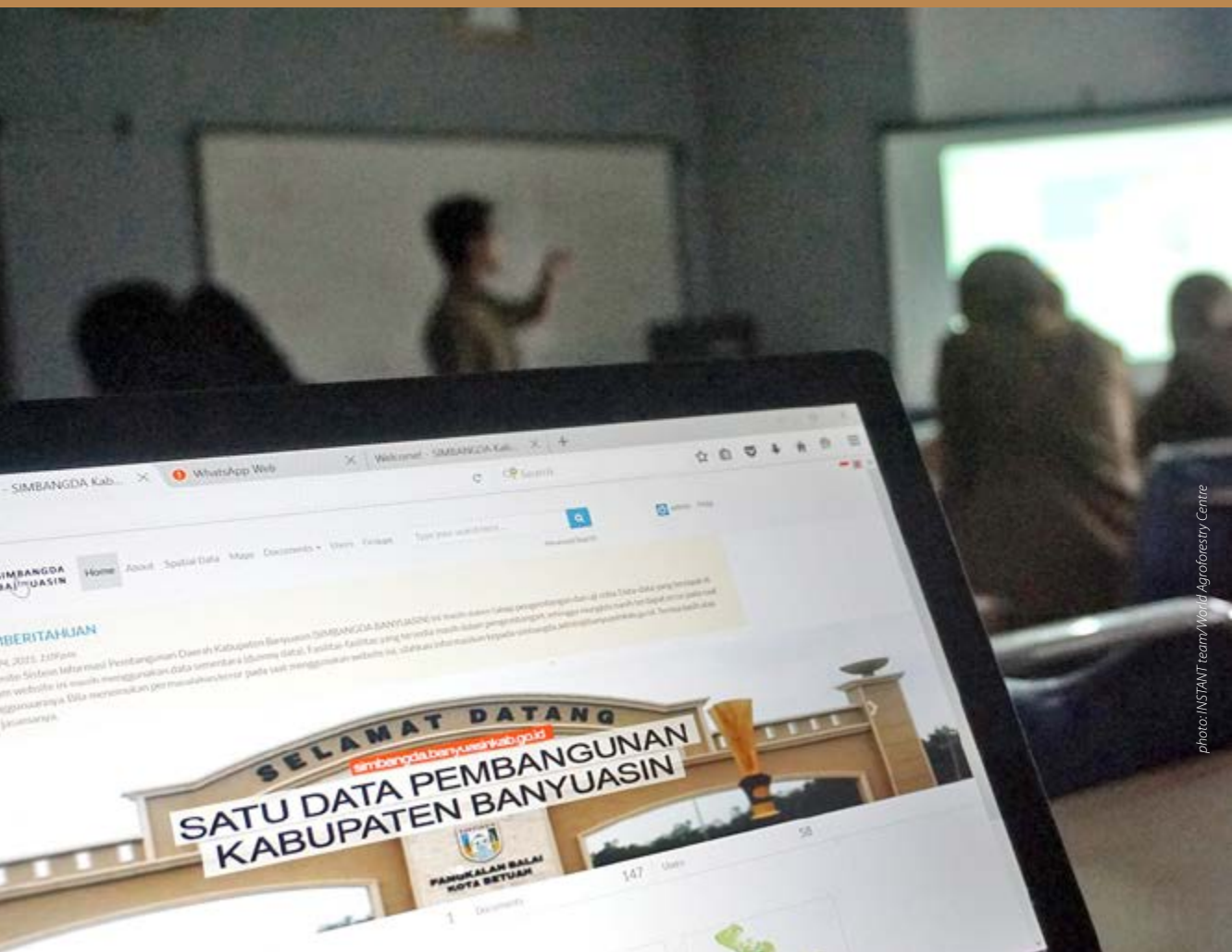
The TKA members were introduced to the method used in the LAMA-I programme in the first phase of the training "Land-use Planning for Multiple Environmental Service (LUMENS)" as a framework and land use planning tool that takes multiple environmental services into consideration. The training was not only carried out through presentations, but also through the introduction of software, direct practice, training and group presentation and discussion. The training participants are expected to be able to truly master the technical skills required to compile strategies for land-use planning to support the regional low-emission development using various methods.

The regeneration of TKA undertaken by Bappeda South Sumatra and LAMA-I was crucial, considering the role of local government as the leader of the national emission reduction programmes which have been planned in Indonesia. In 2009, Indonesia committed to reduce its greenhouse gas emission by 29% by 2030, according to the report of Intended Nationally Determined Contribution (INDC) at COP 21 in Paris.

The regeneration activity should also be maintained, considering that sustainable development planning is continuous work. The government of South Sumatera is also expected to have a regular regeneration programme after the LAMA-I programme ends to ensure the availability of experts in sustainable development in the province.

INSTANT Dukung Kabupaten Banyuasin Meletakkan Fondasi bagi Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan

INSTANT Supports Banyuasin District in Establishing the Foundation for Sustainable Green Development



Sistem informasi untuk pembangunan sumber daya lahan berkelanjutan atau Information System for Sustainable Development (INSTANT) telah mendukung Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam meletakkan fondasi awal bagi sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin. Selama hampir dua tahun terakhir pemerintah daerah dari kabupaten penghasil minyak dan gas bumi ini sedang mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) dengan menggunakan kerangka kerja INSTANT.

Sejumlah capaian penting pun telah berhasil diraih dalam kurun waktu tersebut dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Banyuasin, Bapak Supriadi SE S.MTr M di hadapan Bupati Kabupaten Banyuasin Bapak Yan Anton Ferdian, SH beserta seluruh Kepala Dinas terkait. Capaian tersebut antara lain adalah keberhasilan mengompilasi data dan informasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbasis lahan ke dalam sebuah katalog data Kabupaten Banyuasin. Tim SIMBANGDA pun telah membuat aplikasi sistem informasi berbasis web, yang dapat diakses melalui www.simbangda.banyuasinkab.go.id.

Capaian lain yang berhasil dilakukan adalah bahwa berbagai data dan informasi dasar pembangunan daerah telah diunggah ke dalam SIMBANGDA Banyuasin. Tidak berhenti di situ, tim juga telah berhasil membuat halaman informasi yang bersumber dari data dan informasi yang tersedia di dalam SIMBANGDA Banyuasin. Keberhasilan kegiatan SIMBANGDA di Banyuasin juga mencakup penyiapan payung hukum dan pedoman pengelolaan data dan informasi. "Kami hingga saat ini sedang membuat draft peraturan yang akan menjadi pedoman pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin," ujar Pak Supriadi. Beliau juga menambahkan bahwa tim telah membuat mekanisme pengelolaan data dan informasi sebagai dasar sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Bapak Yan Anton Ferdian SH, menyambut secara baik pengembangan SIMBANGDA ini, antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh Bupati Banyuasin ini dengan menghimbau kepada seluruh jajaran SKPD untuk wajib mengunggah data-data yang diperlukan guna optimalisasi fungsi SIMBANGDA. "SIMBANGDA ini sangat baik sekali dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, jadi kalau ada SKPD yang

The Information System for Sustainable Development (INSTANT) has supported the Government of Banyuasin District in establishing the early foundations for the local development data management systems in the district. For nearly the past two years the local government of the district that produces oil and gas as the economy main resources, is currently developing Information Systems Local Development (SIMBANGDA) using INSTANT framework.

A number of important achievements occurred during that period and these were presented by the Head of the Department of Communication and Information (Dishubkominfo) of Banyuasin district, Mr. Supriadi SE Mstr, to the Banyuasin Regent, Mr. Yan Anton Ferdian, SH, and all related heads of district unit agency (SKPD). Those achievements include success in compiling information and data from each land-based Regional Work Unit (locally known as SKPD) into a data catalogue of the Banyuasin district. The SIMBANGDA team has also developed a web-based information system application which can be accessed via www.simbangda.banyuasinkab.go.id.

Another successful achievement was the upload of various data and basic information on regional development into SIMBANGDA Banyuasin. Furthermore, the team has also managed to create pages of information derived from the data and information available in SIMBANGDA Banyuasin. The success of the SIMBANGDA Banyuasin activity also includes the preparation of legal protection and guidelines for data and information management. "We are currently preparing regulation drafts that will be the guidelines for data and information management in Banyuasin district government," said Mr. Supriadi. He added that the team has also created a data and information management mechanism as the base of the data management system of regional development used by the Banyuasin district government.

Mr. Yan Anton Ferdian SH welcomed the development of SIMBANGDA; the Banyuasin regent showed his enthusiasm by urging all SKPDs to upload the data required to optimise the functions of SIMBANGDA. "SIMBANGDA provides very good support for regional development planning; therefore it is unreasonable if there is still any SKPD which hasn't uploaded the required data" said Mr. Yan Anton to all the SKPD member in the audience.

SIMBANGDA is a form of integrated data management which provides basic information for



masih terlambat mengirimkan data-data yang dibutuhkan ini sangat kelewatan" ujar Pak Yan Anton kepada seluruh jajaran SKPD yang hadir

SIMBANGDA merupakan suatu bentuk pengelolaan data secara terpadu dalam rangka menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu proses pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengembangkan SIMBANGDA dengan menggunakan kerangka kerja INSTANT melalui kemitraan dengan proyek Locally appropriate mitigation actions in Indonesia (LAMA-I) yang didukung oleh World Agroforestry Centre (ICRAF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dan Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM).

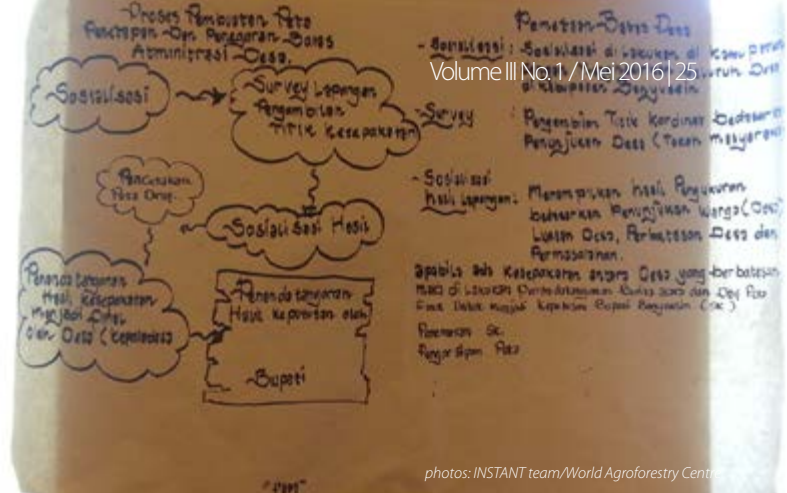
Dalam proses tersebut, INSTANT hadir guna mendukung pemerintah daerah untuk mengelola data dan informasi di daerah melalui empat komponen utama. Komponen pertama adalah mendorong ketersediaan data dan metadata secara partisipatif. Data dan metadata ini harus sesuai dengan standar atau kaidah pengelolaan data dan informasi yang disepakati baik di tingkat nasional maupun global. Komponen yang kedua adalah membangun sistem dan infrastruktur yang mempermudah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisien. Sistem dan infrastruktur yang dibangun ini dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Selain perangkat sistem dan infrastruktur, INSTANT juga menyentuh aspek sumberdaya manusia. Hal ini tercermin dalam komponen ketiga yaitu mempersiapkan sumberdaya manusia agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Komponen ini sangat penting karena sumberdaya manusia yang kompeten merupakan salah satu kunci strategis dalam upaya

decision making in the sustainable regional development process. The government of Banyuasin district developed SIMBANGDA using the INSTANT framework through a partnership with the Locally Appropriate Mitigation actions in Indonesia (LAMA-I) project which is supported by the World Agroforestry Centre (ICRAF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM).

INSTANT is included in the process to support local government in managing all the data and information in the region through its four major components. The first component is to encourage the availability of data and metadata in a participatory manner. The data and metadata must be in accordance with the standards or rules of data and information management agreed on at both the national and global levels. The second component is to build systems and infrastructure that facilitate the management of data and information on regional development information independently, effectively and efficiently. The systems and infrastructures were built by taking available resources into account.

In addition to the systems and infrastructure, INSTANT also covers the human resources aspect. This is reflected in the third component, which is to prepare human resources to be actively involved in the management of local development data and information. This component is essential, since competent human resources are one of the strategic keys in sustaining the data and information management system that has been built.



photos: INSTANT team/World Agroforestry Centre

keberlanjutan sistem pengelolaan data dan informasi yang telah dibangun.

Hal ini merupakan satu keunggulan yang patut diapresiasi dari pengembangan kerangka INSTANT dengan mengikutsertakan pengembangan sumberdaya manusia sebagai salah satu komponen, dimana banyak program sejenis lainnya yang hanya menonjolkan aspek sistem dan infrastruktur saja. INSTANT juga meningkatkan potensi keberlanjutan dengan mempertimbangkan penyiapan aspek peraturan dan kelembagaan yang dapat memberikan kepastian aturan, petunjuk, bentuk, peran, dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah

Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam berlimpah seperti Banyuasin, sistem seperti SIMBANGDA dengan kerangka kerja INSTANT ini menjadi sangat relevan karena dapat memberikan dukungan data dan informasi yang sah dan terkini sehingga pemerintah daerah dapat memetakan kondisi sumberdaya di wilayahnya serta memformulasikan strategi pengelolaan sesuai dengan sumberdaya tersebut. Data dan informasi ini juga akan menentukan ketepatan dan kecermatan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah atas permasalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi di wilayah yuridiksinya.

Dalam pelaksanaannya ke depan, pemutakhiran data dan informasi di dalam SIMBANGDA serta komitmen pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan perlu terus dibina dan ditingkatkan. Hal ini tentu saja dapat berjalan baik dengan dukungan semua pemangku kepentingan secara konsisten, sehingga pembangunan SIMBANGDA di Kabupaten Banyuasin dapat mewujudkan sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah yang dicita-citakan.

This is one advantage that should be appreciated from the development of the INSTANT framework which included human resources development as one of the components, where many other similar programmes only highlighted the systems and infrastructure aspects. INSTANT also increases the potential for sustainability by considering the preparation of regulatory and institutional aspects that can give certainty of rules, instructions, forms, roles and responsibilities for the stakeholders involved in the development of the data management system of regional development.

A system like SIMBANGDA that uses the INSTANT framework becomes relevant to areas which have abundant natural resources like Banyuasin because it provides valid and up-to-date data and information which enable local government to map the resource conditions in the region and to formulate appropriate and suitable management strategies. These data and information will also determine the accuracy and precision of decision-making by local government on resource management issues that occur in its area of jurisdiction.

The update of data and information in SIMBANGDA and the commitment to an integrated, accessible and sustainable data and information management system need to be continuously developed and improved for future implementation. This, of course, can be best done with the consistent support of all stakeholders; therefore the development of SIMBANGDA in Banyuasin district can meet their aspirations for a regional data management system.

Dari Kebijakan menuju aksi nyata:

Mengawal Pembangunan Rendah Emisi Berbasis Lahan di Sumatera Selatan

From Policy into Action: Overseeing Land-based Low-Emission Development Planning in South Sumatra



Rencana pembangunan rendah emisi merupakan dokumen strategis yang akan menentukan apakah suatu daerah sudah bergerak ke arah yang tepat atau belum. Dokumen ini bukan dokumen statis yang dibuat sekali lalu selesai, tapi selayaknya bersifat dinamis, sebagai dokumen hidup yang perlu terus menerus dikaji ulang, diperkuat, dan disempurnakan agar tetap relevan mengawal gerak pembangunan yang dicita-citakan.

Hal ini disadari penuh oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, di bawah koodirnasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Sumatera berhasil merampungkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) pada tahun 2012. Bahkan dokumen ini telah disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2012 tentang RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan. Namun, dalam rangka mengikutsertakan kondisi terkini terkait potensi emisi dan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menurunkan emisi, dokumen ini sedang dalam proses revisi.

Dalam rangka mendukung proses revisi ini, Bappeda Sumatera Selatan dan mitra kerja pembangunan program Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I), mengadakan rangkaian kegiatan Pelatihan dan Dialog Kebijakan dengan topik "Mewujudkan Pembangunan Hijau Melalui Penyusunan Rancangan Pembangunan Rendah Emisi di Provinsi Sumatera Selatan". Kegiatan pelatihan penyusunan strategi pembangunan rendah emisi sektor berbasis lahan diselenggarakan dari tanggal 11 sampai 15 April 2016 dan diikuti oleh perwakilan 17 pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta kapasitas teknis pemerintah kabupaten dalam menyusun strategi pembangunan rendah emisi khususnya dari sektor lahan di daerah masing-masing. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran pentingnya sinergi berjenjang dalam melaksanakan perencanaan pembangunan rendah emisi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang Bappeda Sumatera Selatan Ibu Regina Aryanti ST, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam arahannya ketika membuka pelatihan ini mengatakan bahwa "Saat ini memang masih hanya di level provinsi saja, tetapi ternyata tidak bisa demikian, karena beberapa hal memang harus dilakukan oleh kabupaten". Ibu Regina juga menambahkan bahwa "Kedepan penyusunan rencana aksi penurunan emisi harus dilakukan secara sinergi berjenjang, mulai dari

The low-emissions development plan is a strategic document that will determine whether an area has moved in the right direction or not. It is not a static document that once made is considered finished; instead, it should be a dynamic, living document that needs to be continuously reviewed, strengthened and enhanced in order to remain relevant to oversee the aspired developments.

This is well understood by the Regional Government of South Sumatera, which (under the coordination of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of South Sumatra province) has successfully completed the Regional Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (RAD-GRK) in 2012. In fact, this document has been legalised in the form of Governor Regulation No. 34 in 2012 on RAD-GRK of South Sumatra Province. However, the document is being revised in order to include the latest conditions related to the potential emissions and to other kinds of activities which are able to reduce emissions.

In order to support the revision process, Bappeda South Sumatra and its development partner programme, Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I), held a series of training and policy dialogues on the topic 'Creating Green Development Through the Drafting of Low-Emission Development Plan in South Sumatra Province'. Training on the drafting of the low-emission development strategy for the land-based sector was held from 11 to 15 April 2016 and attended by representatives from 17 district governments in South Sumatra province.

This activity aimed to strengthen the understanding and technical capacities of district governments in developing low-emission development strategies in their respective areas. An additional goal of the activity was to raise awareness on the importance of phased synergy in the implementation of low-emission development planning.

The head of the Technical Implementation Unit (UPTB) on Spatial Planning of Bappeda South Sumatera, Mrs. Regina Aryanti ST, representing the head of Bappeda in South Sumatera province, said in her opening speech "It is only at the provincial level at the moment, but it cannot be done that way, because most of the



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



photo: Arizka Mufida/World Agroforestry Centre



photo: Arizka Mufida/World Agroforestry Centre



photo: Arizka Mufida/World Agroforestry Centre



photo: Rachman Pasha/World Agroforestry Centre

level pemerintah kabupaten, provinsi, baru kemudian terintegrasi dengan rencana aksi nasional”.

Selama pelatihan, peserta menerima beberapa materi yang dapat memperkuat kapasitas teknis mereka mengenai perencanaan pembangunan rendah emisi berbasis lahan. Meskipun kegiatan ini diberi tajuk pelatihan, namun setelah mengikuti kegiatan ini dapat pulang ke daerah masing-masing dengan membawa output nyata dari kegiatan tersebut. “Peserta membuat draft rencana aksi untuk masing-masing kabupaten. Harapan kita mereka dapat langsung bekerja dan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk panduan kebijakan di masing-masing kabupaten,” tutur Bu Regina.

Pelatihan teknis penyusunan strategi pembangunan rendah emisi sektor berbasis lahan ini menggunakan metode Land-use Planning for Multiple Environmental Services for Low-Emission Development Strategy (LUMENS) yang dikembangkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF). Metode ini memungkinkan terjadinya proses negosiasi multistakeholder dalam menyusun perencanaan tata guna lahan berkelanjutan yang dapat mendukung peningkatan penghidupan masyarakat sekaligus menjaga dan memulihkan jasa lingkungan.

Sebagai bagian dalam proses sinergi berjenjang dalam perencanaan pembangunan rendah emisi, pengarusutamaan strategi perencanaan pembangunan rendah emisi kedalam rencana pembangunan daerah sedang gencar dilakukan oleh para pelaku kunci pembangunan di Sumatera Selatan. Langkah awal dilakukan dengan menetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah seperti penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi pionir dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal ini tertuang dalam visi misi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 “meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainability)”. Strategi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan tujuan program LAMA-I yang selama hampir tiga tahun ini telah bekerja bersama dengan pemerintah daerah di tiga kabupaten untuk menyusun strategi pembangunan rendah emisi.

implementations have to be applied in the district.” She also added “The drafting of the emission reduction action plan in the future should be carried out in a nesting process (synergy n synchronizing the mitigation action planning), starting from the district level and then up to the provincial level, and later being integrated with the national action plan.”

The participants received several materials during the training that can help strengthen their technical capacity on low-emission development planning. They also received real output from the activity that can be applied back in their districts, even though the activity was initially intended purely as training. “The participants made drafts of the action plan for their respective districts. It is our hope that they can start working and produce something that can be used as a policy guideline in their respective districts,” said Mrs. Regina.

The technical training in drafting the low-emission development strategy for the land-based sector used the Land-use Planning for Multiple Environmental Services for Low-Emission Development Strategy (LUMENS) which was developed by the World Agroforestry Centre (ICRAF). The method enables negotiation among multi-stakeholders on sustainable land-use planning that can support the improvement of people’s livelihoods as well as maintain and restore ecosystem services at the same time.

The mainstreaming of the low-emission development planning strategy into the regional development plan is being intensively conducted by the key actors of development in South Sumatera, as part of the nesting process in low-emission development planning. The first step involved determining that the Strategic Environmental Study (KLHS) must be implemented in the preparation of policy and the government programme, such as the preparation of the Regional Spatial Plan (RTRW), the Short-term Development Plan (RPJP) and the Medium-term Development Plan (RPJM).

South Sumatera province is one of the pioneer in development planning to achieve environmentally sound outcomes, as can be seen in its development vision and mission for the period 2013–2018, ‘The Improvement of Sustainable Environmental Management and Disaster Handling’. The development strategy for

Selain pelatihan, para peserta juga berkesempatan menghadiri dialog dengan pemangku kebijakan yang dilaksanakan Bappeda Sumatera Selatan dan LAMA-I pada 13 April 2016. Acara ini menampilkan pembicara dari pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) Ibu Syamsidar Thamrin, Kasubdit Iklim dan Cuaca, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang Bappeda Sumatera Selatan Ibu Regina Aryanti ST, Staf Ahli Gubernur bidang Perubahan Iklim Bapak Najib Asmani, Pemerintah Kabupaten Banyuasin diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin Bapak Ir. Zulkifli MPA dan perwakilan dari Program LAMA-I, Dr. Suyanto selaku pimpinan program LAMA-I.

Dalam dialog ini terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 10% dari total baseline. Dengan adanya dialog ini diharapkan akan terbangun kesepahaman pada para pihak terhadap rancangan pembangunan rendah emisi yang telah diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan semenjak 2012.

Ibu Syamsidar Thamrin dari BAPPENAS menghimbau kepada para pihak terkait pembangunan untuk berkerja bersama membangun Indonesia yang lebih hijau “Kegiatan penurunan emisi harus dilaksanakan secara bersama dan tidak bisa berjalan sendiri sebab banyak faktor yang mempengaruhi, maka untuk mencapai target penurunan emisi, setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah”.

Ibu Syamsidar menambahkan bahwa dari satu hal yang bisa dilakukan seperti contohnya melakukan penghijauan kembali di lahan-lahan kritis dapat mengembalikan fungsi jasa lingkungan yang tadi nya sudah rusak atau menurun, selain itu manfaat ekonomi pun bisa di dapatkan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat setempat, walaupun tentunya yang terpenting dilakukan adalah untuk tidak melakukan penebangan dan menjaga hutan agar sumber daya alam tetap lestari dan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

South Sumatera province is in line with the objective of the LAMA-I programme which has already cooperated with three district governments to prepare low-emission development strategies over most of the last three years.

In addition to the training, the participants were also given the opportunity to sit in on a dialogue sessions held with related stakeholders in land-based sector which were conducted by Bappeda South Sumatra and LAMA-I on 13 April 2016. The event featured speakers from central governments which were represented by: head of sub-directorate of Weather and Climate of the Ministry of National Development Planning (PPN/BAPPENAS), Mrs. Syamsidar Thamrin; the representative of the Provincial Government of South Sumatera as the head of the Technical Implementation Unit (UPTB) on Spatial Planning of Bappeda South Sumatera, Mrs. Regina Aryanti, ST; the Special Staff to the Governor of South Sumatra in the Climate Change Department, Mr. Najib Asmani; the representative of the District Government of Banyuasin, as the head of Bappeda Banyuasin, Mr. Ir. Zulkifli MPA; and Mr. Dr. Suyanto, head of the LAMA-I programme, as the representative from the LAMA-I Programme.

It was revealed in the dialogue that South Sumatra provincial government seeks up to 10 percent reduction in total baseline greenhouse gas emissions in the province. An understanding among all parties about the low-emission development plan which has been conducted by the South Sumatera Provincial Government since 2012 is expected to occur through the dialogue.

Mrs. Syamsidar from BAPPENAS encouraged all parties related to the development to cooperate in developing a greener Indonesia. “All efforts to reduce emissions must be done together since there are many influencing factors involved. Therefore, in order to achieve the emission reduction target, every area must prepare a low-emission development plan which is integrated with regional development planning.”

She also added that one of the things that could be done was reforestation on critical lands that can restore the functions of environmental services which have been damaged or have declined. Furthermore, economic benefits can be gained to improve the livelihood of local communities. However, the most important thing to do is to stop logging and protect the forest in order to maintain the sustainability of natural resources and to optimise forest benefits for the sake of the community.



photo: CCRPM/IPB

Paviliun Indonesia COP 21 Paris: Sekelumit pembelajaran Upaya Inisiatif Aksi mitigasi lokal Berbasis Lahan di Indonesia

Indonesian Pavilion at COP 21 Paris: Lessons Learned from Locally Mitigation Action Initiatives from Land-based sector in Indonesia

Praktisi perencanaan pembangunan rendah emisi Indonesia berkesempatan berbicara pada satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) 21 dari Badan PBB untuk Perubahan Iklim, di Paris, Perancis, akhir November tahun lalu. Ajang ini menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi pengalaman dari upaya mitigasi perubahan iklim melalui sektor berbasis lahan.

Salah satu sesi dalam Side event Paviliun Indonesia bertajuk Land and Forest Governance at Multilevel Levels in Supporting Climate-change mitigation: Lesson Learned from the Tropics ini menampilkan enam pembicara dari berbagai instansi yang terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan rendah emisi dari sektor berbasis lahan. Pembicara dari pemerintah nasional yaitu, Bapak Dr. Medrilzam dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS) menyampaikan pembelajaran dari proses unilateral penurunan emisi gas rumah kaca berbasis

Last November, the low emissions development planning practitioners in Indonesia had the opportunity to speak at a discussion session in the Indonesian Pavilion at the Climate Change Conference or the Conference of Parties (COP) 21 of the United Nations Climate Change, in Paris, France. This event became an opportunity to share experience from our efforts to mitigate climate change through the land-based sector.

On of the session at the side event: "Land and Forest Governance at Multi-levels Supporting Climate-Change Mitigation: Lessons Learned from the Tropics" featured six speakers from the various agencies involved in the planning the development of low-emissions from the land-based sector.

The first speaker from the national government, Mr. Dr. Medrilzam from the Ministry of National Development Planning (PPN / Bappenas) conveyed the lessons learned from the process of unilateral

lahan di Indonesia. Bapak Medrilzam mengungkapkan bahwa “target penurunan emisi yang telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia merupakan hasil perumusan, analisis dan penilaian yang berdasarkan keilmuan dan metodologi yang valid”. Perwakilan dari Pemerintah Nasional juga hadir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ibu. Dr. Belinda Arunarwati Tanuwijaya yang menyampaikan topik pembelajaran dari proses berjenjang system informasi (SIGN SMART).

Turut hadir menceritakan pembelajaran mengenai penyusunan strategi pembangunan rendah emisi berbasis lahan di tingkat Kabupaten adalah Ibu Dra Hana Hikoyabi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Papua. Jayapura merupakan salah satu kabupaten yang telah difasilitasi oleh Program Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) dan Program Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) dalam upaya penyusunan rencana aksi mitigasi dari sektor berbasis lahan sekaligus mengembangkan sistem monitoring secara partisipatif. Ibu Hana mengatakan Jayapura memulai perencanaan pembangunan rendah emisi dengan membentuk kelompok kerja (Pokja).

Program ParCiMon dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Program ini didukung pendanaan oleh Uni-Eropa dan dilaksanakan oleh beberapa konsorsium mitra yang terdiri dari World Agroforestry Centre (ICRAF), Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI) dan Universitas Brawijaya. Sementara Proyek LAMA-I dilakukan di enam kabupaten yang ada di dua provinsi, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya dan Merauke di Provinsi Papua dan Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas dan Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek LAMA-I didukung pendanaan oleh Danish Development Agency dan

reduction in greenhouse gas emissions on land-based sector in Indonesia. Mr. Medrilzam revealed that “emission reduction targets committed by the Indonesian government is the result of the formulation, analysis and assessment based on the science and valid methodology”. Another speaker from the National Government was from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) Mrs. Dr. Belinda Arunarwati Tanuwijaya conveyed the lessons learned from the nested system on greenhouse gas emission (SIGN SMART).

From the local government representatives, Mrs. Dra Hana Hikoyabi Head of Regional Development Planning Board Jayapura regency, Papua also delivered the lessons learned of low-emission development strategies on land-based sector planning process at the district level. Jayapura regency has received assistance from the Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) program and the Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) program, in order to develop locally mitigation action plan from land-based sector as well participatory monitoring system. Mrs. Hana said “Jayapura begin planning for low emission development by establishing a working group (WG)”.

The ParCiMon program has been implemented in Papua Province, particularly in three Regencies in Jayapura, Jayawijaya and Merauke. The ParCiMon program is funded by the European Union and carried out by the World Agroforestry Centre Indonesia in partnership with Development Task Force (PLCD–TF), Brawijaya University, and Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI/ Papua Environmental Foundation). Whereas



didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas dan di implementasi kan oleh konsorsium mitra yaitu World Agroforestry Center (ICRAF), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific-Bogor Agricultural University (CCROM-IPB).

Melalui kegiatan LAMA-I, penguatan kapasitas anggota Pokja pembangunan rendah emisi ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan sekaligus menjadi kekuatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan rendah emisi, karena melibatkan proses partisipatif dari masyarakat lokal yang tergabung dalam Pokja. Pokja ini juga merupakan "agent of change" yang bisa membawa perubahan yang diharapkan mampu mengisi kekurangan untuk dapat menjembatani kearifan lokal dengan kebijakan pemerintah. Pokja Kabupaten Jayapura telah menghasilkan strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura, dengan 8 (delapan) skenario aksi mitigasi, "Berdasarkan analisa historis, Kabupaten Jayapura berpotensi menurunkan emisi sebesar 23,5 persen pada 2030," ujarnya.

Bapak Prof. Dr. Rizaldi Boer dari Centre for Climate Risk and Opportunity Management- Bogor Agricultural University (CCROM-IPB) mengatakan penguatan kapasitas pemerintah daerah memang sangat penting dalam perencanaan aksi mitigasi, karena saat ini program ini belum menjadi prioritas utama banyak pemerintah daerah di Indonesia. "Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman bahwa melakukan aksi mitigasi sebenarnya sekaligus menjawab isu-isu pembangunan," ujarnya ketika menyampaikan topik "paradox antara sektor berbasis lahan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dia juga menggarisbawahi ketersediaan sarana yang dapat memberikan asistensi bagi pemerintah daerah dalam

the LAMA-I programme, is funded by the Royal Danish Embassy (DANIDA) and supported by Bappenas with the following implementers: World Agroforestry Centre (ICRAF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific-Bogor Agricultural University (CCROM-IPB)

Strengthening the capacity of the low-emission working group was a strategic step that was carried out from the LAMA-I project, at the same time has become an instrument on the low-emission development planning, implementation and monitoring process, because it involves a participatory process from the local community who are members of the Working Group. The Working Group is also considered an "agent of change" that could bring valuable changes that combines local wisdom with government policy. Jayapura District Working Group has resulted a low-emission development strategies in Jayapura, with 8 (eight) scenarios mitigation actions, "Based on historical analysis, Jayapura district has the potential to reduce emissions by 23.5 percent by 2030," she said.

Mr. Prof. Dr. Rizaldi Boer of the Centre for Climate Risk and Opportunity Management-Bogor Agricultural University (IPB CCROM) said that strengthening the capacity of local government is very important in planning the mitigation actions, because at this time, the program is not a top priority for many local governments in Indonesia.

"Efforts should be made to increase the understanding necessary to undertake mitigation actions as well as answering the actual development issues," he said. He also



mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang sangat diperlukan.

Perwakilan dari World Agroforestry Center (ICRAF) Ibu Dr. Sonya Dewi menyampaikan pembelajaran mengenai proses penguatan kapasitas dalam penyusunan strategi pembangunan rendah emisi. Ibu Sonya mengungkapkan dari proses penyusunan pembangunan rendah emisi di tingkat provinsi, beberapa poin pembelajaran yang cukup penting adalah bahwa ketersediaan kerangka kerja dan perangkat yang mudah digunakan dalam proses penyusunan strategi. Tersedianya perangkat ini harus dibarengi oleh penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan fungsi perangkat tersebut. Dengan ketersediaan perangkat kerja dan kapasitas yang maksimal, hal ini masih perlu di dukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk dapat menginternalisasi strategi pembangunan rendah emisi kedalam rencana pembangunan daerah.

Pembicara terakhir juga berasal dari ICRAF yaitu Bapak Dr. Peter Akong minang yang membagi pembelajaran dari implementasi program REDD+ di beberapa negara. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara-negara tropis terkemuka yang telah membuat komitmen dan melakukan aksi untuk mitigasi perubahan iklim. Bersama Peru, Kamerun, dan Vietnam, sebuah penelitian untuk mengetahui kesiapan negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan REDD+. Penelitian ini berkontribusi secara global dalam memberikan pemahaman bahwa tata kelola hutan pada level nasional menjadi faktor penting dalam keseluruhan infrastruktur REDD+ secara global dan pemicu deforestasi dan degradasi seharusnya dikaji secara teliti guna menyukseskan REDD+.

Kehadiran pembicara dari berbagai institusi membuat acara ini berhasil memberikan perspektif yang komprehensif tentang tata kelola lahan dalam rangka perencanaan pembangunan rendah emisi. Tak pelak lagi, *side event* ini menjadi salah satu magnet yang menarik pengunjung mendatangi Paviliun Indonesia dalam perhelatan COP 21 tersebut.

Paviliun Indonesia memang dimaksudkan untuk menampilkan kepada komunitas internasional mengenai tindakan nyata dan semangat aksi mitigasi yang dilakukan Indonesia di lapangan. Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan apa yang dihadirkan pada paviliun ini sejalan dengan negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam forum tersebut.

underlined the need for the availability of facilities that can provide assistance to local governments in integrating climate change mitigation into development planning in the medium and long term.

Representatives from the World Agroforestry Center (ICRAF) Mrs. Dr. Sonya Dewi conveys learning about the capacity strengthening process in the preparation of low-emission development strategies. Mrs. Sonya Dewi conveyed that in the preparation of low-emission development strategy at the provincial level, the lessons learned that was quite important was that the availability of tools that is easy to use in the process of strategy development. The availability of this device must be accompanied by strengthening of the capacity of local governments to be able in optimizing the function of the tools. With the availability of tools and maximum capacity, policy support is necessary to enable the internalization of low emission development strategies into local development plans.

The last speaker also comes from ICRAF, Mr Dr. Peter Akong Minang who share the lessons learned from the implementation of REDD + programs in several countries. Indonesia is one of the few countries that has made a leading tropical commitment and taken action to mitigate climate change. Together with Peru, Cameroon and Vietnam, a study is underway to determine the readiness of these countries to implement REDD+. This study will contribute globally to providing understanding that forest governance at the national level is crucial in the overall global REDD+ infrastructure and that the drivers of deforestation and degradation should be carefully reviewed in order for REDD+ to succeed.

The presence of speakers from various institutions contributed to the successful provision of a comprehensive perspective on the governance of land in the context of low-emission development planning. Inevitably, this side event became one of the magnets that attracted visitors to the Indonesia pavilion at COP 21.

The Indonesian pavilion was intended to show the international community something of the real action and spirit of mitigation actions undertaken by Indonesia in the field. Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to Control Climate Change, Mr. Rachmat Witoelar, said that what is presented in the pavilion is in line with the negotiations undertaken by Indonesia in the forum.

Biografi Regina Aryanti

Optimisme, Kunci Keberhasilan dalam Berkarya



photos: Arizka Mufida/World Agroforestry Centre

The Biography of Regina Aryanti

Optimism:

Key to success in life

"Since childhood, my parents are always told that there is nothing in this world that you can never do, just it a try and you will make it", that's the quote that describes the optimism of Mrs. Regina Ariyanti one of a development practitioner when I asked about what drives you in life. The mother of two daughters and a son has devoted her life for more than 14 years in being part of the South Sumatera development activity. The Woman who love to sing and traveling, began his career as a consultant in one of the International organization which engaged with administration population and HIV-Aid, that paved the way to her career in one of the development agencies in South Sumatera.

"Sejak kecil, orang tua Saya selalu berpesan, di dunia ini tidak ada yang bisa, harus mencoba, pasti berhasil" itulah kutipan yang menggambarkan optimisme seorang Ibu Regina Ariyanti salah seorang praktisi pembangunan ketika di tanya mengenai apa motto hidup yang dimiliki. Ibu dari dua orang putri dan satu orang putra ini telah mengabdikan diri nya selama hampir 14 tahun untuk menggerakan roda pembangunan di Sumatera Selatan. Wanita yang hobi bernyanyi dan travelling ini, memulai karirnya sebagai tenaga konsultan di salah satu lembaga internasional yang bergerak di bidang kependudukan dan HIV-Aid yang membuka jalan untuk nya berkarir di salah satu instansi pembangunan.

Menjadi tenaga konsultan, Bu Regina mulai memasuki ranah pemerintahan menjadi faslilitator

Being a consultant, Mrs. Regina began to enter the realm of government as the city facilitator for projects funded by international NGO's that work on issues of reproductive health and working under the coordination of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Palembang District. What's memorable of working in in Bappeda Palembang was even if works as a consultant but she had the opportunity and loads of useful experience. "Although I work as a consultant, but I am often involved a meeting with the Head of agency, parliament and other government officials, it is very helpful" said Mrs. Regina who was born in Bandar Lampung 49 years ago.

Following to her father footsteps who worked as civil servants in the education office, in 2002-2004 he

Kota untuk proyek yang di danai oleh NGO Internasional yang bekerja untuk isu-isu kesehatan reproduksi dan di tempatkan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang. Hal yang berkesan selama bekerja di Bappeda Kota Palembang menurutnya adalah walaupun ia merupakan tenaga honorer tapi ia berkesempatan mendapatkan banyak pengalaman yang menurutnya memberikan banyak Ilmu yang bermanfaat. “walaupun honorer, tapi Saya sering sekali terlibat rapat dengan para Kepala Dinas, DPRD dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya, hal itu sangat bermanfaat” ujar perempuan kelahiran Bandar Lampung 49 tahun silam.

Ingin mengikuti jejak sang Ayah yang bekerja sebagai abdi negara di dinas pendidikan, pada tahun 2002-2004 ia memberanikan diri untuk mengikuti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Berkat dukungan dan doa dari keluarga, anak ke empat dari lima bersaudara pasangan Heribertus Surahyo dan Paulina Tripoliana Sadik ini akhirnya lulus menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Muba. Lulus dari tes CPNS di kabupaten Musi Banyuasin, Bu Regina pun langsung di angkat menjadi ketua tim Perencanaan, sebuah tim khusus yang di bentuk oleh Bupati terpilih untuk membenahi kota sekayu.

Perjalanan karirnya di Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berjalan cukup mulus sampai pada akhirnya pada tahun 2007 Bu Regina di tunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis (PLT) Kepala Bappeda Muba. Penunjukan tersebut cukup dirasa mengejutkan karena Bu Regina merasa masih di awal karir sebagai pegawai negeri sipil, namun karena penunjukan itu ia rasakan sebagai sebuah amanah, Bu Regina pun menjalani tanggung jawab yang diberikan.

Setelah menjadi PLT Kepala Bappeda Muba selama hampir 2 tahun, wanita yang gemar olahraga **Softball** ini, akhirnya menemukan jalannya ke Bappeda Provinsi. Di tahun kepindahannya ke Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, ia langsung di angkat menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dengan modal latar pendidikan dengan jurusan Planologi di ITB, Bu Regina dipercaya untuk menangani berbagai permasalahan tata ruang termasuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim di provinsi Sumatera Selatan.

Menurutnya perubahan iklim berkaitan erat dengan tata ruang, karena pembangunan harus terus berjalan untuk kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain

ventured to follow the Test for civil servants candidat (CPNS) in Musi Banyuasin district (Muba). Thanks to the support and prayers from her family, the fourth child of five siblings for the couple Mr. Heribertus Surahyo and Mrs. Paulina Tripoliana, and passed the test and worked as civil servants in Muba District and was immediately recruited as the head of planning team, a special team that was formed by the Regent to fix the Sekayu city.

Her career in the Bappeda office was consider quite smooth even in 2007 Mrs. Regina designated to become the acting of Head of Bappeda Muba district (PLT). This new position was deemed quite surprising for Mrs. Regina as she was still in his early career as a civil servant, but because she felt the appointment as a trustee given to her, Mrs. Regina lead the responsibility given.

Becoming the head of Bappeda Muba (PLT) for almost 2 years, the woman who love play softball as her activity, finally found her way to work at the South Sumatera provincial Bappeda provincial. After she was moved the Provincial Bappeda, she was immediately appointed to become the Head of Technical Implementation Unit of Spatial Unit. With her educational background in the major capital planning of the Institute of Technology Bandung (ITB), Mrs. Regina was trusted to handle a variety of spatial planning including various activities related to climate change in the province of South Sumatra.

Mrs. Regina thinks that climate change is closely related with spatial planning, due to the development activity that should be running for the people's welfare. But on the other hand, the impact of climate change also unavoidable, and the government of Indonesia as well as people globally has been trying to anticipate the impact by showing the commitment to mitigate and adaptation effort to the climate change.

She felt that the Indonesian government's commitment to mitigate climate change is clear enough though some improvements are still necessary to be done within the framework of the implementation on the ground. Slowly, both the national government and in the region began to find a better focus with appropriate methodologies. Considerable challenges she felt in the effort to mitigate climate change is to provide better understanding to development actors, that the environmentally sound development plan as a strategic move to mitigate climate change is something that should be the mindset of all people and to be the guidance in development activities.

dampak perubahan iklim pun tidak bisa di hindari, bahkan dengan dampak yang kian nyata pemerintah Indonesia dan global pun kian gencar melakukan proses antisipasi, yaitu dengan berbagai komitmen untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim ini sudah cukup jelas la rasakan, namun beberapa perbaikan tetap perlu dilaksanakan dalam rangka implementasi di lapangan. Perlahan pemerintah baik di nasional maupun di daerah mulai menemukan fokus yang lebih baik dengan metodologi yang tepat. Tantangan yang cukup besar la rasakan dalam upaya mitigasi perubahan iklim adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku pembangunan, bahwa merencanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai langkah strategis upaya mitigasi perubahan iklim adalah sesuatu yang seharusnya menjadi mindset semua orang dan menjadi pedoman kegiatan pembangunan. Hal ini akan menjadi faktor kunci untuk dapat menginternlisasikan konsep dan perencanaan pembangunan rendah emisi ke seluruh program di sektor pembangunan.

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai tindak lanjut pemerintah nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi awal munculnya beberapa program dengan payung perubahan iklim di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Bappeda pada saat itu memutuskan bahwa program-program perubahan iklim ini sangat penting dalam upaya mendukung proses perencanaan pembangunan rendah emisi, termasuk salah satunya adalah program **Locally Mitigation Action in Indonesia** (LAMA-I) yang di danai kedutaan Denmark. Kegiatan LAMA-I yang dilakukan di tiga kabupaten di Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, dirasakan sangat penting dan seharusnya tidak terpisahkan dengan strategi yang harus di rencanakan dan dilaksanakan di tingkat provinsi.

Menurut Ibu Regina, LAMA-I memiliki pendekatan yang memudahkan dalam penyusunan RAD-GRK, karena pada awalnya penyusunan RAD-GRK memiliki beberapa kendala yang cukup menyulitkan. "Dengan pendekatan **Land-use planning for multiple environmental services for low-emission development strategy** (LUMENS) yang diperkenalkan oleh LAMA-I, secara logika lebih rasional sebagai alat bantu yang memudahkan dalam penyusunan kebijakan dalam waktu yang cukup cepat, dan mendukung proses perbaikan di level perencanaan yang lebih luas *scope* nya".



photo: Arizka Mufida/Mind Agroforestry Centre

This will be a key factor to be internalize the concept of low emissions development planning to the development programs.

Regional Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction (RAD-GRK) as a follow-up to national governments to reduce greenhouse gas emissions was the start of the emergence of several programs on mitigating the climate change in the South Sumatera province. Head of Bappeda at that time decided that the programs to mitigate climate change are very important in order to support low-emission development planning process, including one of the program that is funded by the Danish Embassy the Locally Mitigation Action program in Indonesia (LAMA-I). LAMA-I is being implemented in three districts in South Sumatra, namely in Musi Rawas, Banyuasin and Banyuasin, the provincial Bappeda at that time consider that the LAMA-I program is very important and should be integrated to the strategy at the provincial level

According to Ms. Regina, LAMA-I have an approach that facilitate the preparation of RAD-GRK, due to the difficulties that occurred at the beginning of the RAD-GRK development. "With the approach of Land-use planning for multiple environmental services for low-emission development strategy (LUMENS) introduced by LAMA-I, that is logically more rational not only as tools that facilitate the development of policies in quite easy and fast, but also supports the improvement planning process with a broader *scope*".

Secara pribadi, Bu Regina merasa kegiatan yang di laksanakan dalam program LAMA-I adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola suatu program. Ia merasa penyusunan suatu program harus berdasarkan ilmu pengetahuan, artinya berdasarkan data yang bisa di olah dan dikelola, sehingga pada akhirnya dapat merumuskan strategi yang tepat dan menambah kekuatan pada saat pelaksanaan program, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yang dapat menjadi bahan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program selanjutnya.

Dari sisi kelembagaan, walaupun fokus LAMA-I lebih banyak di level Kabupaten, namun manfaat kegiatan LAMA-I juga sudah mulai dirasakan di tingkat provinsi khususnya peningkatan kapasitas bagi staf penataan ruang Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sekaligus meningkatkan kesadaran akan isu-isu pembangunan rendah emisi. Melihat perkembangan yang terjadi di Kabupaten, Bu Regina merasa inisiatif penyusunan strategi pembangunan rendah emisi yang telah dilakukan di tiga kabupaten sangat membantu penyusunan strategi di tingkat provinsi, karena pada dasarnya penyusunan strategi di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan kumpulan informasi dan data dari kabupaten, dengan adanya data yang valid dari kabupaten, sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi akan lebih mudah dilakukan.

Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk di tingkat kabupaten melalui program LAMA-I Ia rasakan sebagai suatu kekuatan yang dapat mengkoordinir para pelaku pembangunan dari berbagai sektor. Bu Regina sempat mengenang pada awalnya LAMA-I cukup mengalami kesulitan khususnya permasalahan **leadership** di kabupaten yang membuat pelaksanaan program ini terhambat. Namun dengan dukungan dari provinsi, dan fleksibilitas program LAMA-I yang lebih mengkomodir kebutuhan kabupaten pada akhirnya LAMA-I memberikan manfaat bagi perkembangan pembangunan rendah emisi di kabupaten.

Kegiatan peningkatan kapasitas personal baik di Pokja Kabupaten maupun yang mulai dilakukan di Pokja Provinsi tidak hanya mengarusutamakan konsep-konsep pembangunan rendah emisi pada para pelaku pembangunan tapi juga sudah menimbulkan ketertarikan dan kepedulian dari pemerintah daerah lainnya diluar dampingan LAMA-I untuk mulai merencanakan pembangunan rendah emisi di daerahnya masing-masing.

Personally, Mrs. Regina felt the activities carried out in the LAMA-I program-I are basically consists the stages that must be done to manage a program. She felt the preparation of a program should be based on science, and data that is valid and manageable, so that in the end it can formulate the right strategies and add strength during the implementation of the program, as well as monitoring and evaluation process that may result to improvement to the implementation process on the next program.

From the institutional side, according to her opinion although the focus LAMA-I more at the level of district, but the government at provincial level especially Bappeda has been benefited from the LAMA-I implementation, especially the increase in capacity for the staff at the Bappeda spatial unit and other related regional work units (SKPD), an at the same time has raised the awareness of low-emission development issues. Seeing the developments taking place in the district, Mrs. Regina felt the district initiatives to develop the low-emission development strategy that has been conducted in three districts have greatly assist the provincial government in the preparation of the strategy at the provincial level, because basically the preparation of the strategy at the provincial level is based on a collection of information and data from the districts, with the absence of data valid from the district, synchronization between the district and provincial programs will be easier to do.

The Working Group (WG) established at the district level through the LAMA-I program, she considered as one of the strength to increase the coordination aspects between the development actors from the related sectors. Mrs. Regina was recalled at the beginning the implementation of LAMA-I program experienced difficulties particularly in the district leadership that makes the program implementation was slightly hindered. But with the endorsement from the provincial Bappeda and the flexibility of LAMA-I program more in accommodating the district needs has ultimately shown the beneficially of LAMA-I program in the preparation low-emission development planning in the district.

The capacity strengthening activities at the three district which has been done, and recently has been starts to be done in the provincial working group has the purposes of not only to mainstream concepts of low-emission development for development practitioners but also have raises the interest and concern of other district governments, to start

Sistem informasi *Information System for Sustainable Development (INSTANT)* yang dibangun melalui program LAMA-I juga dirasakan telah meningkatkan aspek pengelolaan data. INSTANT tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan data tapi juga meningkatkan akses untuk proses pertukaran data antar instansi dan publikasi data kepada masyarakat. Namun tetap menurutnya perubahan tidak semerta-merta terjadi dengan mudah, motivasi personel perlu tetap ditingkatkan dan komitmen pimpinan juga diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada.

Di tahun ketiga pelaksanaan program LAMA-I, proses sinergi berjenjang mulai dilakukan untuk dapat mengintegrasikan strategi pembangunan rendah emisi yang sudah disusun pokok ke dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten maupun *up-scale* ditingkat provinsi dan nasional. Melihat perkembangan ini Bu Regina merasa harusnya proses ini akan lebih mudah, dengan upaya-upaya sinkronisasi kegiatan yang sudah dilakukan, dapat meningkatkan akses untuk integrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bu Regina mengharapkan ke depannya proses internalisasi pembangunan rendah emisi ini dapat dilakukan oleh seluruh SKPD terkait pembangunan, tidak terbatas di dinas kehutanan saja, karena banyak aspek yang memiliki dampak positif dari penurunan emisi. Ia juga mengharapkan data-data yang telah dikumpulkan bersama melalui program LAMA-I ini dapat dilaporkan sehingga tersusun sebuah database yang baik dan terkoordinir dan kedepannya juga diharapkan provinsi bisa terus terhubung dengan kabupaten untuk bisa memonitor perkembangan yang terjadi di kabupaten. Ke depannya juga ia menginginkan adanya dampingan yang lebih intensif dari pemerintah nasional terhadap program-program di daerah, sehingga daerah dapat melihat hasil yang didapatkan melalui pelaksanaan program dapat dijadikan rekomendasi yang bermanfaat di tingkat provinsi.

Bagi Bu Regina, pembangunan berwawasan lingkungan ini merupakan mimpi terbesarnya untuk dapat ia wujudkan, “teruslah bermimpi karena mimpi adalah bagian dari motivasi” itulah sepenggal kalimat yang menjadi motto hidupnya. Optimisme perubahan menuju pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan manfaat lingkungan tetap ia pelihara untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. (Text by Yessi Dewi Agustina, contributor: Ifran Imanda)

the low-emission development planning in their respective regions.

The Information System for Sustainable Development (INSTANT) built through LAMA-I program has improved on the data management aspects. INSTANT not only useful for data management but also improve access to the exchange of data between agencies and the publication of data to the public. But changes not necessarily come easily, the personnel motivation need to be increased in a perpetually process and committed leadership is also required to manage existing resources.

In the third year of LAMA-I implementation, the nesting process has been initiated due to enable the integrating the low-emission development strategy that has been drawn-up by working groups into regional planning at the district and to be up-scale into the provincial and national planning. Overseeing the process, Mrs. Regina felt the integrating process should be much easier, with the efforts that has been carried out in synchronizing the programs, should improve the access to integrate the low-emission development strategy into the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD).

Mrs. Regina expects in the future, the low-emission development and the internalization process can be done by all related SKPD, not only carried out by the forestry unit agency alone, because many aspects that have a positive impact on the reduction of emissions. She also encourage that the data that has been collected through the LAMA-I program may be reported to be well managed and coordinated, she also expected to continue the improved coordination with the district to be able to monitor the progress made in the district. A more intensive assistance from the national government for similar programs in the district is highly expected, so the district may observe the results obtained through the implementation of the program contributes a useful recommendations at the provincial level.

Mrs. Regina stated that, the low-emission development towards a green development her biggest dream that she wishes to come true. “Keep dreaming, because dream is part of the motivation” reflects her motto in life. The Optimism towards the development that takes into account the balance between the economic benefits with environmental benefits still she maintained for a better Indonesia in the future.



photo: Yasi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

ParCiMon is designed to support Papua in achieving its low-emission development goal and contributing significantly to Indonesia's overall low-emission development as an integral part of climate-change strategies. It focuses on building the capacity of key civil society groups in Papua to participate and monitor the planning cycle of low-emission development from land-based sector

***ParCiMon** didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan*

LAMA-I aims to strengthen the capacity of key local governments to develop integrated low-emission development plans as part of Indonesia's nationally appropriate mitigation actions

***LAMA-I** berupaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi sebagai bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim nasional*

World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



Research
Program on
Forests,
Trees, and
Agroforestry



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

